

## **SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN**

(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Polewali  
Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL)



**OLEH:**

**ANDI NURTA**

**B111 12 362**

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2016**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA  
KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN**

(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Polewali  
Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL)

**OLEH:**

**ANDI NURTA**

**B111 12 362**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana Dalam Hukum Keperdataan  
Program Studi Ilmu Hukum

**PADA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2016**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN**

(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Polewali  
Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL)

**Disusun dan diajukan oleh:**

**ANDI NURTA  
NIM B 111 12 362**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 7 Juni 2016  
Dan Dinyatakan Lulus

#### **Panitia Ujian**

**Ketua,**



**Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.**  
**NIP. 19601008 198703 1 001**

**Sekretaris,**



**Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H.**  
**NIP. 19540101 198303 1 007**

**A.n. Dekan  
Wakil Dekan I,**



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610607 198601 1 003**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

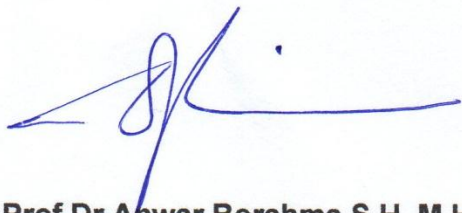
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

**Nama : Andi Nurta**  
**Nomor Induk : B111 12 362**  
**Bagian : Hukum Keperdataan**  
**Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Akta  
Kelahiran Anak Luar Kawin  
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Polewali  
Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

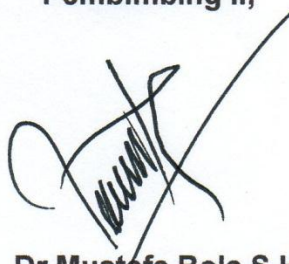
Makassar, Mei 2016

**Pembimbing I,**



**Prof. Dr. Anwar Borahma, S.H., M.H**  
**NIP. 19601008 198703 1 001**

**Pembimbing II,**



**Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H**  
**NIP. 19540101 198303 1 007**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI NURTA
Nomor Pokok	: B11112362
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2016

  
Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH  
NIP. 19610607 198601 1 003

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk:*

*Kedua orang tua tersayang*

*Ibu: Hj.Andi Nurhayati (Almarhumah)*

*Ayah: H.Andi Tanu Sagga (Almarhum)*



\*\*\*

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan..*

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

(QS. Al-Insyirah: 5-6).

\*\*\*

*“Selalu ada kemudahan untuk orang yang bersungguh-sungguh.*

*Dalam hal apapun. Masalahnya, terkadang kita harus diuji  
dulu untuk mengetahui seberapa sungguh-sungguh  
kita menginginkan sesuatu dan  
mengusahakannya.*

*Banyak orang gagal dalam ujian kesungguhan. Belum selesai,  
tapi terburu-buru menginginkan kemudahan. Padahal bisa  
jadi, kita memang belum sampai pada puncak  
kesungguhan kita. Padahal bisa jadi, kita  
memang belum layak mendapatkan  
hadiah kemudahan itu.*

*Saat suatu nanti hidup kamu terasa sulit, artinya pada saat itu  
kamu harus meningkatkan kesungguhan kamu. Karena  
kesungguhan adalah jembatan penyeberangan dari  
kesulitan menjadi kemudahan.”*

**(Nazrul Anwar)**

## ABSTRAK

**ANDI NURTA** (B111 12 362), “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL)**”. Di bawah bimbingan **Anwar Borahima**, selaku Pembimbing I dan **Mustafa Bola**, selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akta kelahiran anak luar kawin tanpa mencantumkan nama ayahnya dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam Penetapan Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL tentang permohonan pembuatan akta kelahiran.

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenis dan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan dengan teknik tanya jawab (wawancara) langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini untuk memperoleh data primer. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah (1) keabsahan akta kelahiran anak luar kawin tanpa mencantumkan nama ayahnya adalah tidak sah karena akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tidak berdasar pada Penetapan Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL. Selain itu, Pengadilan Negeri Polewali pun tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara Sunubiah yang seharusnya dilimpahkan ke Pengadilan Agama. (2) Adapun pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan permohonan penerbitan akta kelahiran dalam Penetapan Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL adalah terdapat beberapa kekurangan, yaitu tidak mencantumkan dalil hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, hakim mendasarkan keabsahan perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan perkawinan yang merupakan kewajiban administratif, tetapi dapat dibuktikan dengan keadaan nyata bahwa laki-laki dan perempuan telah hidup bersama sebagai suami isteri. Selain itu, hakim tidak menjadikan *Burgerlijk Wetboek* sebagai patokan dalam pertimbangan hukumnya, terutama dalam hal keabsahan seorang anak yang tidak hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan kedua orang tua, tetapi juga berdasarkan pada akta kelahiran, keadaan nyata, dan saksi-saksi. Oleh karena pertimbangan hukumnya yang keliru, maka hasil penetapannya pun tidak tepat.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, tiada kata yang penulis ucapkan selain syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta Alam, penguasa kerajaan langit dan bumi. Salam dan shalawat Penulis junjungkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul yang menjadi panutan bagi seluruh umat manusia, dan juga kepada para sahabat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Akhirnya tibalah rasa bahagia yang penuh haru, untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu penulis dalam rangka penyelesaian tugas akhir ini. Penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang pertama tentunya kepada kedua orang tua Penulis; Ayah **H.Andi Tanu Sagga** (*Almarhum*) dan Ibu **Hj.Andi Nurhayati** (*Almarhumah*) yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, mendidik dan mendewasakan Penulis hingga meraih gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa apa yang Ayah dan Ibu berikan tidak dapat dinilai dengan apapun di dunia ini. Ketulusanmu mendidik dan menanamkan nilai-nilai moral dalam diri ini, Insya Allah akan mengantarkan Penulis menjadi orang besar kelak. Kini Allah SWT telah mengabulkan doamu sehingga Penulis berhasil menjadi orang yang pertama meraih gelar Sarjana, yaitu Sarjana Hukum (S.H) dalam keluarga.

Semoga engkau bahagia di alam sana dan kepadamulah kupersembahkan karya ini.

Kepada kakak Penulis **Andi Ani Kuswati,S.TP**, dan adik Penulis **Andi Putra Jaya**, serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya. Kalian semua adalah motivator Penulis, jasa-jasa kalian sangat membantu dalam penyelesaian studi Penulis. Insya Allah kelak jasa-jasamu akan terbalaskan dan semoga kalian tetap dalam lindungan-Nya.

Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Wakil Rektor, serta staf dan jajarannya.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak **Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Mustafa Bola, S.H.,M.H.** selaku

Pembimbing II, terima kasih atas segala petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang telah diluangkan untuk Penulis.

4. Ibu **Dr. Nurfaidah Said, S.H.,M.H.,M.Si.**, Bapak **Achmad, S.H.,M.H.**, dan Bapak **Muhammad Basri S.H.,M.H.**, selaku Penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak **Dr. Winner Sitorus, S.H.,M.H.,L.L.M** selaku Ketua Hukum Bagian Keperdataan, Ibu **Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan, beserta seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan perantarnya Penulis dapat menerima ilmu pengetahuan tentang hukum yang sangat bermanfaat..
6. Bapak **Muhammad Zulfan Hakim,S.H.,M.H** selaku Penasihat Akademik Penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Pihak **Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia**, terima kasih atas bantuan Beasiswa Bidik Misi. Beasiswa yang Penulis peroleh selama menimba ilmu S-1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. **Ketua Pengadilan Negeri Polewali beserta staf dan jajarannya**, terima kasih telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan selama Penulis melakukan penelitian.
9. Kepala **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar** dan bapak Yultan Polopadang selaku Kepala Seksi Akta Kelahiran, terima kasih telah memberikan bantuan dan meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh Penulis.
10. Bapak **H.Muhammad Mimsyad Rusli, S.Ag** selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah **Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar**, terima kasih telah memberikan bantuan dan meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh Penulis.
11. Ibu **Hj.Syahban Nur Hamzah, S.Pd., M.Pd** selaku Kepala Sekolah dan guru-guru **SDN Negeri 001 Polewali**. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama Penulis menimba ilmu di bangku Sekolah Dasar.
12. Bapak **Sarman, S.Pd** selaku Kepala Sekolah dan guru-guru **SMP Negeri 2 Polewali**. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama Penulis menimba ilmu di bangku Sekolah Menengah Pertama.
13. Bapak **Drs. Muhammad Faezal, M.Si** selaku Kepala Sekolah dan guru-guru **SMA Negeri 1 Polewali**. Terima kasih atas ilmu

yang telah diberikan selama Penulis menimba ilmu di bangku Sekolah Menengah Atas.

14. Bapak **Muh. Syahrir** selaku **Kepala Desa Balleanging**, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Terima kasih atas segala bantuannya selama Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Balleanging.

15. Ibu **Sunubiah** selaku Pemohon Penetapan Pengadilan Negeri Polewali yang dikaji di dalam Skripsi Penulis.

16. **Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** atas bantuan dan keramahannya “melayani” segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penulisan Skripsi ini sebagai tugas akhir.

17. Bapak Akhmad Tasrif, terima kasih atas segala bantuannya selama Penulis melakukan bimbingan.

Selanjutnya Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, bahkan menjadi salah satu sumber motivasi dikala Penulis dalam suasana penuh kemalasan. Tanpa mengurangi rasa hormat, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teman-teman **Angkatan 2012 (Petitum) FH-UH**, terima kasih atas segala kebersamaannya mulai dari awal kita menginjakkan kaki di FH-UH hingga akhirnya kita harus berpisah untuk mengejar mimpi-mimpi kita.

2. Keluarga besar **Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI Komisariat Unhas)**, terutama kepada Pengurus KAMMI Komisariat Unhas Periode 2015-2016, **Muh.Ihsan Harahap** (Ketua Umum) beserta dengan seluruh staf dan jajarannya. Terima kasih telah banyak berbagi ilmu, pengalaman berorganisasi, dan ikatan persaudaran. Penulis sangat bangga bisa mengenal orang hebat seperti kalian.
3. Teman-teman **LDM Al-Aqsho Universitas Hasanuddin**, terima kasih telah berbagi ilmu agama dan pengalaman organisasi kepada Penulis. Semoga kebaikan akan terus kita lakukan tanpa mengharapkan balasan apapun.
4. Teman-teman **KKN Reguler Angkatan 90 Unhas Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Ujung Loe**, terkhusus teman-teman Posko **Desa Balleanging** A.Ida Widyasari (Ida), Georjana Prima Nella Randa (Ella), Yusriadi (Yus), Made Ari Wibawa (Made), dan Saharuddin (Sahar). Terima kasih atas perhatian, kebahagiaan, kekeluargaan, dan segala-galanya. Persaudaraan kita tidak akan mudah luntur seiring berjalannya waktu.
5. Teman-teman **Exon Chingkinie**, teman SMA Penulis yang sampai saat ini masih tetap menjalin komunikasi dengan baik, walaupun kita terpisah oleh jarak. Terima kasih atas segala cinta dan kasih yang diberikan kepada Penulis.

6. Teman-teman **Magang Klinik Hukum Perlindungan Konsumen 2015 di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar**; Giovani, A.Azhim Fachreza Aswal, Sadly Bakri, dan Putri Nirina
7. Sahabat-sahabat Penulis **Ika Ristiana, Ayu Dewi Seruni (Almarhumah), Indah Sari, Andi Yunita Putri Wulandari, Ayu Asrini Djamaluddin, Reski Nur Amalia, Muh. Ruslan Afandi,S.H.,**
8. Ukhtibebscu; **Darmawati Dalle, St. Khaera Umam, Ratmayani, dan Fauziah Alimuddin.** Terima kasih atas canda, tawa, haru, dan kekonyolan yang diberikan kepada Penulis. Semoga Allah selalu menjaga dan memberikan yang terbaik untukmu.
9. Teman-teman terdekat Penulis; **Dina Ledyana,S.H, A.Fadhilla Jamila,S.H, Alifia Shahnaz, Rizky Amalia, Sitti Syahrani Nasiru, Rahmi Utami Ilyas, Rahmi Firdasari, Ika Indah Yani, Destri Kristianti Parubang, Putery Reztu Anggraeni Jumran, lin Iryani, Melisa, Siti Fadhillah.**
10. Adindaku **Viyani Annisa Permatasari**, terima kasih atas motivasi yang diberikan kepada Penulis. Terima kasih atas kesetiaan yang diberikan untuk mendengarkan curahan hati Sang Pejuang Skripsi.
11. Kak **Yuliana, S.H.** Kakak yang baru-baru ini Penulis kenal dan langsung akrab karena kesamaan misi. Kakak yang sama-sama berjuang dengan Penulis untuk menggapai mimpinya. Terima kasih



atas kebersamaannya, semoga kakak segera mendapat gelar M.Kn-nya.

Serta semua pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian Skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan kalian. Kritik dan saran dibutuhkan demi penyempurnaan Skripsi ini.

*“Semua yang kita hasilkan dari kesuksesan akan sirna jika kita tiada, yang tertinggal adalah nilai-nilai keluhuran budi yang pernah kita lakukan untuk mencapai kesuksesan itu”*

Makassar, 12 Mei 2016

**Andi Nurta  
B111 12 362**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan .....	7
1. Pengertian Perkawinan .....	7
2. Sahnya Perkawinan .....	8
B. Tinjauan Umum Mengenai Anak Luar Kawin .....	10
1. Pengelompokan Anak Berdasarkan Status dan Kedudukan Hukumnya .....	10
2. Pengertian Anak Luar Kawin dan Hubungannya dengan Ayah Biologisnya .....	20
3. Penyebab Anak Luar Kawin .....	23
C. Kedudukan Anak Luar Kawin .....	25
1. Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat .....	25
2. Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pandangan Islam .....	26
3. Kedudukan Anak Luar Kawin dalam KUHPerdara .....	27
4. Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Undang-Undang	

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	29
5. Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	30
D. Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 yang Berkaitan dengan Status Anak Luar Kawin .....	30
1. Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan Merupakan Kewajiban Administratif yang Tidak Berhubungan dengan Keabsahan Perkawinan .....	30
2. Asal Usul Keturunan Dapat Dibuktikan Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....	39
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Berlaku Bagi Semua Anak Luar Kawin .....	44
E. Catatan Sipil .....	46
1. Pengertian Catatan Sipil .....	46
2. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ...	47
F. Akta Kelahiran .....	51
1. Pengertian Akta Kelahiran dan Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran .....	51
2. Tujuan dan Fungsi Akta Kelahiran .....	53
G. Akta Kelahiran Anak Luar Kawin .....	55
1. Prosedur Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Anak Diluar Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	55
2. Penetapan Pengadilan Terkait Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin .....	58
H. Kompetensi Pengadilan dalam Perkara Perdata.....	59

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	60
B. Jenis dan Sumber Data .....	60

C. Teknik Pengumpulan Data .....	62
D. Analisis Data .....	63
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Keabsahan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Tanpa Mencantumkan Nama Ayahnya .....	64
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam Penetapan Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL tentang Permohonan Pembuatan Akta Kelahiran .....	75
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xix</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum mengatur kehidupan manusia mulai dari lahir hingga ia meninggal, termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Negara mewajibkan setiap perkawinan haruslah dicatatkan. Hal ini agar tercipta masyarakat yang tertib administrasi. Perkawinan dianggap sah jika dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatatan Nikah. Apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka status hukum perkawinan tidak dapat diakui oleh negara, sekalipun sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing karena pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk pembuktian status anak yang akan lahir.

Perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah perkawinannya dianggap tidak sah. Oleh karena perkawinannya yang tidak sah, maka anak yang kemudian dilahirkannya pun akan menjadi anak yang tidak sah. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdara), anak tidak sah dalam arti sempit disebut juga anak luar kawin.

Pokok persoalan dalam Hukum Keluarga menyangkut asal usul keturunan seorang anak yang lahir diluar perkawinan bertumpu pada hubungan hukum antara si anak dengan ayah biologisnya, sedangkan hubungan hukum dengan pihak ibu hampir tidak pernah menjadi persoalan karena hubungan itu telah tercipta dengan sendirinya tanpa harus didahului dengan perbuatan hukum apapun, kecuali terhadap apa yang disebutkan dalam KUHPerdara yang menganut prinsip pengakuan mutlak, dimana seorang ibu biologis tidak secara otomatis akan menjadi ibu yang memiliki hubungan perdata dengan anaknya tanpa tindakan pengakuan. Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengakuan anak oleh pihak ibu kandung, karena undang-undang telah menentukan bahwa anak yang lahir demi hukum langsung memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ibu dan keluarga ibunya. Hal ini didasarkan pada suatu pertimbangan bahwa tidak terlalu sulit untuk menentukan siapa ibu biologis dari si anak, dibandingkan dengan menentukan siapa ayah biologis dari si anak dalam hal kelahiran tanpa didahului oleh adanya perkawinan<sup>1</sup>.

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran,

---

<sup>1</sup> D.Y Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*. Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 7-8.

secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh Negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat nama, silsilah, dan kewarganegaraannya, serta tidak terlindungi keberadaannya.

Pemberian akta kelahiran diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Idealnya, pembuatan akta kelahiran dilakukan dalam waktu 60 (Enam Puluh Hari) hari sejak kelahiran. Namun, masih banyak terjadi keterlambatan dalam pengurusan akta kelahiran. Hal ini tentunya akan berdampak kepada anak itu sendiri.

Seorang anak berhak untuk mendapatkan akta kelahiran, baik itu anak sah maupun anak diluar kawin. Akta kelahiran bagi anak luar kawin sebagai akibat dari perkawinan tidak sah hanya akan mencantumkan nama ibunya saja. Hal ini karena secara hukum anak-anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya<sup>2</sup>.

Namun, sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012 tentang *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, hubungan keperdataan anak luar kawin bukan hanya dengan ibu dan

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



keluarga ibunya, tetapi juga dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang uji materiil UU Perkawinan, maka memberikan kesempatan kepada anak luar kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Permasalahan akta kelahiran bagi anak luar kawin tersebut menarik bagi peneliti untuk membahasnya. Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Negeri Polewali No.07/PDT.P/2013/PN.POL mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran disebabkan oleh keterlambatan dalam mengurus akta kelahirannya. Akibatnya, pemohon harus meminta Penetapan Pengadilan terlebih dahulu sebelum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan akta kelahiran tersebut. Oleh karena pemohon tidak dapat memperlihatkan akta nikah kedua orang tuanya, maka Hakim Pengadilan Negeri Polewali menganggap pemohon merupakan anak luar kawin.

Dalam penetapan ini, hakim mengabulkan permohonan penerbitan akta kelahiran bagi anak luar kawin tetapi pada kenyataannya, hal ini tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Sehubungan dengan hal di atas, pada kenyataannya Pengadilan Negeri Polewali telah menetapkan Penetapan dengan Nomor: 07/PDT.P/2013/PN.POL mengenai penerbitan akta kelahiran bagi anak luar kawin oleh hakim yang memeriksa perkara ini, ditetapkan bahwa permohonan penerbitan akta kelahiran anak luar kawin dikabulkan untuk sebagian, yakni menyatakan seorang anak perempuan yang bernama Sunubiah merupakan anak sah dari ibunya, St. Awa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok masalahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan akta kelahiran anak luar kawin tanpa mencantumkan nama ayahnya?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam Penetapan Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL tentang permohonan pembuatan akta kelahiran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui keabsahan akta kelahiran anak luar kawin tanpa mencantumkan nama ayahnya.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam Penetapan Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL tentang permohonan pembuatan akta kelahiran.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah referensi Hukum Perdata, khususnya mengenai pandangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap masalah hukum yang berkaitan dengan pemberian akta kelahiran bagi anak luar kawin.
2. Secara Praktis
  - a. Sebagai pengembangan wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keperdataan.
  - b. Dapat menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan referensi pelengkap tentang pemberian akta kelahiran bagi anak luar kawin.
  - c. Untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1).

Dalam keputusan perkawinan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim.

Berdasarkan Hukum Islam: Nikah adalah *akad* yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz atau terjemahan dari kata-kata tersebut.

Jadi, maksud pengertian tersebut ialah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga

maka hendaknya keduanya melakukan *akad* nikah lebih dulu. (An Nisa: 3, “Maka nikahilah olehmu perempuan yang baik bagimu....”)<sup>3</sup>.

Akad nikah tersusun daripada *sighot* (susunan kata) yang berisi *ijab*, yakni penyerahan dari pihak pertama dan *qobul*, yakni penerimaan dari pihak kedua atas pertalian nikah yang dimaksud. Perkataan dari pihak pertama: “Saya nikahkan Engkau dengan anak saya bernama .... dengan mas kawin ”. kemudian diterima oleh pihak kedua: “Saya terima nikah... dengan mas kawin ... tunai/ hutang”.

## **2. Sahnya Perkawinan**

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, sahnya perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1): “Perkawinan itu dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
- b. Pasal 2 ayat (2): “Perkawinan sah menurut negara apabila telah dicatatkan di pencatatan negara”.

Berdasarkan hukum masing-masing agama, apabila beragama Islam dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama), beragama Kristen di Catatan Sipil. Jadi apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka status hukumnya perkawinannya tidak dapat diakui oleh negara, sekalipun sah

---

<sup>3</sup> Bakri A Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/ BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, hlm 11.

menurut hukum agamanya masing-masing, karena pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk pembuktian status anak yang akan lahir. Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Hukum Islam dikenal dengan sebutan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan yang dilakukan di depan pemuka agama dan dihadiri oleh saksi-saksi.

Selain ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam syarat-syarat perkawinan, sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya;
3. Jika salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seseorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan

pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan di atas;

6. Hal-hal yang disebutkan di muka angka 1 sampai 5, berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Anak Luar Kawin**

### **1. Pengelompokan Anak Berdasarkan Status dan Kedudukan Hukumnya**

Berdasarkan status dan kedudukan hukumnya, anak dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah terdiri dari anak kandung dan anak tiri, sedangkan anak tidak sah (anak luar kawin) terdiri dari anak luar kawin yang disahkan, anak luar kawin yang diakui sah, anak zina, dan anak sumbang.

#### **a. Anak Sah**

##### **1) Anak Kandung**

Anak sah menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris



dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat di tengah-tengah lingkungan masyarakat, hak *alimentasi*, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.

Berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan, anak sah diberikan definisi antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 42 UU Perkawinan mengatur bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah”.
- 2) Pasal 250 KUHPdata mengatur bahwa “anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh suami sebagai ayahnya”.

Jadi, Pasal 250 KUHPdata berpangkal pada anggapan suami adalah bapak anak yang dilahirkan atau yang menjadikan dalam suatu perkawinan. Akan tetapi, suami dapat menyangkal sahnya anak itu dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 251, 252, 253, dan 254 KUHPdata.

- 3) Berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma seorang *Doktrinal*, yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya<sup>4</sup>.

## **2) Anak Tiri**

Penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk ke dalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Persoalan menyangkut anak tiri banyak terjadi di Indonesia, seiring dengan tingginya tingkat kawin cerai yang terjadi di masyarakat Indonesia, sehingga anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan terdahulu dengan laki-laki atau perempuan yang telah diceraikannya akan menyandang status sebagai anak tiri pada saat orang tua kandungnya itu menikah lagi dengan laki-laki atau perempuan lain.

Seorang anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya terhadap orang tua kandungnya,

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, 1999, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 80.

hak mewaris seorang anak tiri hanya dari ayah atau ibu kandungnya.

Dalam konsep Hukum Islam seorang anak tiri tidak dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua tirinya. Hukum Islam mendasarkan pewarisan hanya kepada tiga hal antara lain: karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, karena memerdekakan budak<sup>5</sup>. Dalam KUHPerdara anak tiri juga tak bisa mewaris harta peninggalan dari orang tua tirinya.

Oleh karena anak tiri tidak dapat mewaris dari orang tua tirinya, maka pada umumnya jika orang tua tirinya hendak memberikan sebagian hartanya kepada anak, dia bisa melakukannya dengan cara hibah atau membuat wasiat yang jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya atau jika melebihi jumlah tersebut, maka harus disetujui oleh para ahli waris dari orang tua yang meninggal.

Seorang anak tiri tidak berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tua tirinya, tetapi ia tetap berhak menikmati semua hasil yang diperoleh dari harta orang tua tirinya sepanjang orang tuanya masih hidup, hal tersebut sebagai konsekuensi dari

---

<sup>5</sup> <http://konsultasi.wordpress.com/2010/05/20/harta-warisan-untuk-anak-tiri-adakah/>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2016, pukul 14.47 WITA.

prinsip bahwa selain masalah warisan, maka antara anak kandung dengan anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama.

## **b. Anak Luar Kawin**

Anak luar kawin, yang disebut juga anak tidak sah dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.

### **1) Anak Luar Kawin yang Disahkan**

Anak luar kawin yang disahkan adalah anak yang lahir diluar perkawinan orang tua biologisnya dan kemudian bapak atau ayah biologisnya mengawini ibu biologisnya atau kedua orang tua biologisnya ini kawin. Sebelum mengawini ibu biologis sang anak, maka pengakuan atas anak tersebut harus dilakukan oleh ayah biologisnya. Apabila tidak ada pengakuan dari ayah biologis maka dengan mengawini ibu biologis, status anak ini bisa menjadi anak tiri bukan anak luar kawin yang disahkan. Pengakuan seorang anak luar kawin yang akan disahkan oleh bapak biologisnya, dapat dilakukan sebelum orang tua biologisnya kawin atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Akibat dari perkawinan ini, maka status anak luar kawin menjadi anak luar kawin yang disahkan. Oleh karena itu, pengesahan anak

luar kawin dikatakan juga sebagai upaya hukum untuk memberikan suatu kedudukan anak sah melalui perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua biologisnya. Akan tetapi, kalau anak yang akan disahkan tersebut merupakan anak zina atau anak sumbang maka tidak boleh disahkan meskipun kedua orang tuanya kawin.

## **2) Anak Luar Kawin yang Diakui Sah**

Anak luar kawin yang diakui sah oleh bapak biologisnya adalah anak yang lahir diluar perkawinan orang tua biologisnya, tetapi diakui sebagai anak oleh bapak atau ayah biologisnya. Akibat dari pengakuan sebagai anak oleh bapak biologisnya, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan bapak yang mengakuinya. Anak luar kawin ini mempunyai hubungan perdata dengan bapak yang mengakuinya. Konsekuensi dari mempunyai hubungan perdata ini adalah bahwa anak luar kawin yang diakui sah ini dapat menjadi ahli waris dari bapak yang mengakuinya, meskipun bagiannya lebih sedikit dari anak sah. Akan tetapi, jika pengakuan anak luar kawin ini dilakukan pada saat bapak biologisnya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain (istrinya), maka anak luar kawin ini bukan merupakan ahli waris dari bapak biologisnya kecuali:

1. Pengakuan tersebut dilakukan pada saat bapak biologisnya belum terikat perkawinan, atau

2. Dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai keturunan dan pasangan hidupnya juga sudah bukan merupakan ahli waris disebabkan karena telah meninggal atau bercerai<sup>6</sup>.

### **3) Anak Zina**

Perbedaan pengertian zina didasarkan pada 2 (dua) pandangan yang berbeda antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat. Berdasarkan ajaran Islam, semua persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, sedangkan berdasarkan Hukum Barat seorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami isteri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain<sup>7</sup>.

Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak yang lain. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata, bahwa anak zina bersama-sama dengan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum (yuridis) seorang anak yang dilahirkan dari perzinahan

---

<sup>6</sup> <https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/06/17/kedudukan-hukum-anak-luar-kawin/>.  
Diakses pada tanggal 6 April 2016, pukul 20.00 WITA.

<sup>7</sup> D.Y. Witanto, *Op.Cit*, hlm 40.

tidak akan memiliki ayah maupun ibu. Oleh karena itu, seorang anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya, kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 867 ayat (2) KUHPerdara, yaitu:

“Sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang”<sup>8</sup>.

Seorang suami yang berhasil membuktikan tentang gugatan pengingkaran anak sebagaimana diatur dalam Pasal 252 KUHPerdara, akan berimplikasi kepada status dan kedudukan si anak, yaitu dia akan berubah menjadi anak luar kawin. Meskipun demikian, perzinaan yang dilakukan oleh seorang isteri tidak dapat menjadi alasan untuk mengingkari seorang anak, kecuali jika kelahiran anak tersebut disembunyikan oleh isteri dari pengetahuan suaminya dalam arti isteri telah menutupi dan membuat suatu keadaan agar kelahiran tersebut tidak diketahui oleh suaminya. Terhadap hak penyangkalan anak oleh suami juga diatur dalam Pasal 44 UU Perkawinan, yaitu:

“Seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh isterinya jika dia dapat membuktikan bahwa isterinya berbuat zina dan anak tersebut sebagai akibat dari perbuatan zina tersebut.”

---

<sup>8</sup> Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Cet-IV, Rineka Cipta. Jakarta, hlm 43.



Anak zina merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian yang luas (anak tidak sah). Timbulnya istilah anak zina dalam pengertian Hukum Perdata Barat dipengaruhi oleh *asas monogami* secara mutlak dianut oleh KUHPerdata, dimana pada waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh terikat dengan seorang laki-laki saja. Prinsip tersebut berbeda dengan prinsip *poligami terbatas* yang dianut oleh Hukum Islam dimana dalam suatu keadaan tertentu di waktu yang sama seorang laki-laki boleh untuk terikat dengan satu, dua, tiga, dan empat orang perempuan<sup>9</sup>.

#### **4) Anak Sumbang**

Anak sumbang (*incest*) atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan (dalam Hukum Islam), dan sebagainya, yaitu orang yang sama-sama sususuan atau orang tua sususuan tetapi tidak sedarah atau berasal dari ibu yang sama.

---

<sup>9</sup> D.Y.Witanto, *Op.Cit.*, hlm 41.

Pasal 70 huruf d Kompilasi Hukum Islam ada beberapa larangan seseorang untuk melakukan perkawinan antara lain:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu ayah tiri;
- d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang yang sama-sama sesusuan atau orang tua sesusuan dan bibi atau paman sesusuan<sup>10</sup>.

Perbedaan antara konsep larangan perkawinan menurut KUHPerdata dengan UU Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam adalah dalam hal menyangkut saudara sepersusuan yang tidak pernah dikenal dalam konsepsi Hukum Barat. Saudara sepersusuan adalah hubungan persaudaraan yang terjadi antara seorang anak yang sama-sama telah disusui oleh seorang perempuan yang menyusuinya, maka diantara mereka terlarang untuk melangsungkan perkawinan karena darah dari susu yang diminum oleh si bayi akan mengalir di dalam tubuhnya dan oleh

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 136.

karena itu, terjalin hubungan persaudaraan seperti halnya terjalinnya ikatan darah.

Dalam KUHPerdata anak sumbang memiliki kedudukan yang sama dengan anak zina, karena mereka tidak diakui oleh orang tuanya, kecuali apa yang diatur dalam Pasal 283 KUHPerdata dan hanya memiliki hak untuk mendapatkan biaya nafkah seperlunya sebagaimana diatur dalam Pasal 867 ayat (2) sampai dengan Pasal 869 KUHPerdata<sup>11</sup>.

## **2. Pengertian Anak Luar Kawin dan Hubungannya dengan Ayah Biologisnya**

### **a. Pengertian Anak Luar Kawin**

#### **1) KUHPerdata**

Anak luar kawin di dalam KUHPerdata termasuk sebagai kelompok anak tidak sah, sama dengan anak zina dan anak sumbang. Akan tetapi, anak luar kawin memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan anak zina dan anak sumbang, karena anak luar kawin melalui pengakuan oleh orang tuanya masih dapat diperhitungkan sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan hukum KUHPerdata<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 85.

<sup>12</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*. Alumni Bandung, hlm 153.

Anak yang lahir diluar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), dinamakan *natuurlijk kind* (anak alam). Anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayah atau ibunya. Berdasarkan sistem yang dianut BW (KUH Perdata), dengan adanya keturunan diluar perkawinan saja, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Baru setelah ada pengakuan, terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya, demikian menurut Prof. Subekti. Jadi, anak luar kawin tersebut berstatus sebagai anak yang diakui atau istilah hukumnya *natuurlijk kind*.

## **2) Hukum Adat**

Berdasarkan Hukum Adat, anak diluar kawin disebut anak haram dan tidak mempunyai hubungan dengan pria yang menghamili ibunya. Dalam Hukum Adat, karena anak yang dilahirkan diluar kawin merupakan aib, sehingga untuk menutupi aib tersebut boleh diadakannya kawin paksa dengan sembarang pria. Yang penting adalah adanya perkawinan yang sah agar bayi yang lahir dari wanita itu mempunyai ayah secara resmi, walaupun setelah pernikahan pria yang menikahnya itu tidak kembali lagi pada wanita itu.

### **3) Hukum Islam**

Dalam perspektif Hukum Islam, anak luar kawin yaitu anak yang lahir karena tidak adanya ikatan perkawinan yang lazim disebut dengan anak zina, termasuk perkawinan yang terjadi dan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, anak yang dilahirkannya-pun dikategorikan sebagai anak zina. Sedangkan untuk perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah dalam sudut pandang Islam, anak yang lahir dari perkawinan tersebut, meskipun tidak pernah dicatatkan sudah dianggap sebagai anak yang sah<sup>13</sup>.

### **4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Undang-undang ini tidak secara tegas memberikan pengertian tentang istilah “anak luar kawin”, tetapi hanya menjelaskan pengertian anak sah dan kedudukan anak luar kawin, hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 42-43 yang pada pokoknya mengatur:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dilihat dari segi aturan pasal tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa anak luar kawin adalah anak yang

---

<sup>13</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/perkawinan-siri-dan-anak-luar-kawin.html>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2016, pukul 03.42 WITA.

dilahirkan diluar perkawinan dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

#### **b. Hubungan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologisnya**

Berdasarkan UU Perkawinan, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya<sup>14</sup>. Namun dalam konsepsi Hukum Barat, anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah atau ibunya dengan upaya hukum pengakuan anak<sup>15</sup> dan pengesahan anak.

Berdasarkan Hukum Islam, anak luar kawin tidak ada hubungan *nasab* dengan ayahnya, tetapi hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya. Tidak ada saling mewaris dengan ayahnya, karena hubungan *nasab* merupakan salah satu penyebab kewarisan. Ayahnya tidak dapat menjadi wali bagi anak tersebut.

### **3. Penyebab Anak Luar Kawin**

Berdasarkan sebab dan latar belakang terjadinya, anak luar kawin timbul antara lain disebabkan oleh:

- a. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain;

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 280 KUHPerdara.

- b. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan lain;
- c. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita dalam masa *iddah* perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya ada kemungkinan anak luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya;
- d. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah;
- e. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup, tetapi dilakukan juga kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin;
- f. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat izin dari kedutaan besar untuk mengadakan perkawinan karena salah satu dari mereka telah mempunyai isteri,

tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut. Anak ini dinamakan juga anak luar kawin;

- g. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya;
- h. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/ atau Kantor Urusan Agama;
- i. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan, serta tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama<sup>16</sup>.

### **C. Kedudukan Anak Luar Kawin**

#### **1. Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat**

Berdasarkan Hukum Adat, apabila seorang isteri melahirkan anak sebagai akibat hubungan gelap dengan seorang laki-laki bukan suaminya, maka si suami menjadi ayah dari anak yang dilahirkan tadi, kecuali apabila suami berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh masyarakat Hukum Adat, menolaknya.

Hukum adat mempunyai berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut, yaitu adanya lembaga kawin paksa bagi laki-laki yang menyebabkan kehamilan si wanita, dan terhadapnya dapat dijatuhi hukum adat, apabila tidak dipatuhinya. Anak yang lahir diluar perkawinan tidak mempunyai ikatan kekeluargaan menurut hukum dengan yang

---

<sup>16</sup> H. Herusko, *Anak di Luar Perkawinan*, Makalah pada Seminar Kowani, Jakarta tanggal 14 Mei 1996, hlm 6.



menikahnya. Oleh karena itu, anak hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga ibu seperti dikatakan S.A. Hakim, S.H di dalam *Hukum Adat Perorangan, Perkawinan, dan Pewarisan*.

## **2. Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pandangan Islam**

Kedudukan anak luar kawin berdasarkan Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU Perkawinan, karena Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh isterinya dengan meneguhkannya melalui lembaga *li'an*.

Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa:

“Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau sesudah suami itu mengetahui isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.”

Seorang suami yang berhasil membuktikan pengingkaran anak yang dilahirkan oleh isterinya, akan berdampak pada status anak yang dilahirkan menjadi anak tidak sah dan dengan sendirinya akan terputus hubungan perdata dengan ayah. Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam di atas memberikan batasan waktu bagi si suami untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak, yaitu 180 hari sesudah hari lahirnya anak atau 360 hari sejak putusnya perkawinan atau suami mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak jika keberadaan tempat kediaman suami memungkinkan untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.

### **3. Kedudukan Anak Luar Kawin dalam KUHPerdata**

Berdasarkan Hukum Perdata (BW), anak luar kawin tidak mempunyai hubungan keperdataan baik dengan wanita yang melahirkannya maupun dengan pria yang membenihkannya, kecuali kalau mereka mengakuinya<sup>17</sup>. Dengan demikian, secara terperinci ada 3 status/kedudukan anak luar kawin, yaitu:

- 1) Anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya.
- 2) Anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya telah mengakuinya.

---

<sup>17</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, 1978, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 69.

3) Anak luar kawin menjadi anak sah, yakni anak luar kawin yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh perkawinan mereka<sup>18</sup>.

Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang telah terikat dengan perkawinan yang sah dan tidak termasuk anak zina atau anak sumbang<sup>19</sup>.

Akibat pengakuan anak luar kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan timbulnya hubungan perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik daripada anak luar kawin yang tidak diakui.

Pengesahan Anak Luar kawin karena perkawinan orang tuanya, pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum atau (*recht middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua si anak atau dengan "Surat Pengesahan", setelah si anak diakui lebih dahulu oleh orang tuanya.

Berdasarkan Pasal 272 KUHPerdata bahwa anak luar kawin akan menjadi anak sah apabila:

---

<sup>18</sup> Sodharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet.ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 41.

<sup>19</sup> Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kawarisan Perdata Barat*, Cet.Kedua, Prenoda Media Group, Jakarta, hlm 86.

1. Orang tuanya kawin,
2. Sebelum mereka kawin, mereka telah mengakui anaknya atau pengakuan ini dilakukan dalam akta perkawinan.

Dengan demikian, anak yang diakui oleh orang tuanya sebelum mereka kawin, apabila orang tuanya kemudian kawin, begitu juga anak luar kawin yang diakui dalam akta perkawinan, maka demi hukum menjadi anak sah.

#### **4. Kedudukan Anak Luar Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan sebagai unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan Nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) sebagai berikut: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dengan demikian, anak luar kawin tersebut hanya memiliki pertalian kekeluargaan dengan segala implikasinya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah yang membenihkannya.

## **5. Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010**

Kedudukan anak luar kawin tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Jadi, kedudukan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan ayah dan keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.

### **D. Kaidah Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 Yang Berkaitan Dengan Status Anak Luar Kawin**

#### **1. Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan Merupakan Kewajiban Administratif yang Tidak Berhubungan dengan Keabsahan Perkawinan**

Dalam ruang lingkup akademik, memang selalu menjadi *polemik* menyangkut apakah kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana

diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengikat terhadap keabsahan perkawinan ataukah tidak? Sebagian pendapat mengatakan bahwa oleh karena keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan diserahkan kepada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai, maka kewajiban pencatatan tersebut tidak mengikat terhadap sah atau tidaknya suatu proses perkawinan. Namun, berdasarkan pendapat lain bahwa oleh karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, maka syarat pencatatan merupakan syarat tambahan yang mengikat terhadap keabsahan suatu perkawinan dimana hukum akan menganggap bahwa perkawinan itu ada jika telah dicatatkan di kantor pencatat perkawinan.

Pendapat yang kedua tersebut nampaknya lebih banyak diterapkan di dalam praktik, karena terhadap fenomena kawin siri pada umumnya berpandangan bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan siri adalah anak luar kawin atau anak yang secara hukum tidak diakui kedudukannya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan konsepsi agama yang menjelaskan bahwa kawin siri adalah perkawinan yang sah menurut agama dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Majelis Hakim Konstitusi menafsirkan Pasal 2 ayat (2) bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sebagai suatu kewajiban administratif yang tidak mengikat terhadap keabsahan perkawinan, dimana setiap warga negara yang melakukan tindakan hukum yang dianggap akan menimbulkan akibat hukum, bagi para pihak wajib untuk mencatatkan dalam daftar yang telah disediakan oleh negara untuk itu.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang bersifat *privat*, tetapi memiliki dampak yang luas bagi kehidupan manusia, karena sebuah perkawinan akan melahirkan banyak segi hukum antara lain hak dan kewajiban bagi pasangan mempelai, hak dan kewajiban dalam harta perkawinan, hubungan Hukum Keluarga, kedudukan anak, Hukum Perwalian dan banyak lagi segi lain yang mungkin akan timbul dari sebuah perkawinan.

Negara sebagai lembaga hukum publik memiliki kewenangan untuk mengatur tata kehidupan para warganya, termasuk menentukan kewajiban bagi warganya untuk mencatatkan setiap perkawinan demi

tujuan memberikan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Majelis Hakim Konstitusi selanjutnya memberikan pendapat tentang fungsi dari kewajiban pencatatan perkawinan sebagai berikut:

... Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua *perspektif*. Pertama, dari *perspektif* negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur, serta dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan [*vide* Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [*vide* Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945].



Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal usul anak dalam Pasal 55 UU Perkawinan yang mengatur bahwa bila asal usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik, maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan Putusan Pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.

Terdapat beberapa fungsi dari kewajiban pendaftaran perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan antara lain; *Pertama*, pendaftaran perkawinan merupakan fungsi negara dalam melakukan perlindungan bagi warganya karena dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan akan memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat jika di kemudian hari

perkawinan tersebut dipermasalahkan oleh pihak ketiga. *Kedua*, kewajiban pencatatan juga akan bermanfaat jika di kemudian hari timbul persoalan tentang hak waris, harta bersama atau hak-hak lainnya sebagai akibat dari hubungan hukum yang dibuat dengan pihak lain. *Ketiga*, pencatatan perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga peristiwa yang dianggap penting dalam sejarah kehidupan manusia dapat terdokumentasi secara baik dan tertib.

Di sisi yang lain kewajiban pencatatan perkawinan terkesan sebagai upaya intervensi negara terhadap kepentingan *privat*, karena dalam beberapa hal proses perkawinan lebih banyak mengandung dimensi keagamaan dibanding dimensi *legal*, walaupun pendirian seperti itu tidak sepenuhnya benar.

Pendapat Hakim Konstitusi **Maria Farida Indarti** yang menyatakan berbeda sudut pandang menyangkut fungsi pencatatan perkawinan sebenarnya tidak menunjukkan perbedaan pandangan dengan delapan Hakim Konstitusi lainnya menyangkut hak dan kepentingan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Beliau berpendapat tentang esensi kewajiban pencatatan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan seperti ditentukan sebagai berikut:

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari *inkonsistensi* penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan

menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-potong untuk *melegitimasi* sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran isteri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena isteri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak.

Undang-undang merumuskan tentang ketentuan keabsahan perkawinan dengan kewajiban pencatatan secara terpisah, sehingga menjadi *asumsi* bahwa sebenarnya pembentuk undang-undang memang tidak menghendaki adanya pencampuran antara syarat sahnya perkawinan dengan kewajiban para pihak untuk melakukan pencatatan perkawinan. Sejalan dengan itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, sehingga keabsahan perkawinan tetap menjadi *domain* hukum agama dan kepercayaan dari para calon

mempelai, sedangkan negara tidak turut campur dalam persoalan sah dan tidaknya perkawinan.

Konsep keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan sesungguhnya merupakan suatu *implementasi* dari perlindungan negara terhadap *pluralisme* agama yang dianut masyarakat Indonesia, sehingga negara tidak dapat memaksakan suatu ketentuan tentang sahnya perkawinan berdasarkan ukuran dari agama tertentu, karena hal itu bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur: “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menyangkut kewajiban pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, Hakim Konstitusi **Maria Farida Indarti** memiliki pendapat berdasarkan sudut pandang yang agak berbeda sebagaimana dikemukakan dalam uraian *concurring opinion* sebagai berikut:

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-undang *a quo* tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut

agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah. Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang *a quo* juga dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima.

Hakim Konstitusi **Maria Farida Indarti** berpendapat bahwa antara norma hukum dan norma agama yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) memiliki kecenderungan untuk saling melemahkan antara satu dengan yang lain, hal ini disebabkan oleh

undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan yang cukup menyangkut hubungan antara kedua aturan tersebut. Persoalan apakah keabsahan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengandung pengertian juga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) ataukah keduanya tidak saling terpaut menyangkut keabsahan sebuah perkawinan. Selanjutnya menurut beliau bahwa kepentingan negara dalam memberikan syarat-syarat tertentu dalam sebuah perkawinan ditujukan sebagai upaya memberikan kepastian pada norma agama yang menjadi acuan dalam keabsahan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pembahasan di muka, bahwa hukum negara menerobos ruang lingkup pelaksanaan perkawinan sesungguhnya bertujuan untuk menjamin penerapan norma-norma agama secara konsisten oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga tidak sekadar ditujukan untuk memudahkan perkawinan yang sebenarnya dilarang oleh agama yang berlaku. Landasan argumentasi yang digunakan oleh **Maria Farida Indarti** adalah fungsi *sinkronisasi* antara norma agama dengan norma hukum dalam proses perkawinan<sup>20</sup>.

## **2. Asal Usul Keturunan Dapat Dibuktikan Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Pada waktu UU Perkawinan dirumuskan belum terpikirkan oleh pembentuk undang-undang bahwa orang akan bisa membuktikan asal usul keturunan terhadap anak yang lahir diluar perkawinan, terutama jika

---

<sup>20</sup> D.Y. Witanto, *Op.Cit*, hlm 224-231.

si perempuan pernah melakukan hubungan seksual dengan lebih dari seorang laki-laki. Walaupun mungkin pihak perempuan dapat memperkirakan siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Namun, hal itu tidak dijadikan bukti secara hukum yang dapat menunjukkan siapa sebenarnya ayah biologis si anak.

Majelis Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan yang cukup *progresif* menyangkut persoalan tersebut, dimana pembuktian silsilah keturunan melalui bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh si anak dan ibu kandungnya dalam memastikan siapa ayah biologis si anak. Mengenai hal itu Majelis Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan diluar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan diluar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam *perspektif* yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnyanya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa*, baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.

Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan

teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Untuk mencapai tingkat kesempurnaan sebuah aturan hukum, maka hukum harus bersentuhan dengan bidang-bidang ilmu yang lain, terutama dalam hal pembuktian agar persoalan hukum yang terjadi bisa lebih terang dan jelas. Bukan hal yang baru dalam proses penegakan hukum menggunakan peran dari bidang-bidang keilmuan lain, sehingga dalam kaitannya dengan asal usul keturunan orang dapat menggunakan ahli ilmu genetika untuk melakukan pencocokan DNA si anak dengan laki-laki yang ditunjuk sebagai ayah biologisnya, jika hasil pemeriksaanya menunjukkan persesuaian, maka asal usul keturunan dapat dibuktikan di hadapan hukum.

Dalam dunia ilmu pengetahuan *forensik*, test DNA memungkinkan seseorang dapat diketahui memiliki kekerabatan dengan siapa. Tes DNA dilakukan dengan cara mengambil *mitokondria* seseorang untuk mengidentifikasi apakah seseorang memiliki hubungan keluarga dengan pihak ibu atau hubungan keluarga secara maternal. Caranya adalah dengan membandingkan DNA *mitokondria* yang dimilikinya dengan ibu kandung, nenek, atau saudara kandung dari ibu. Karena seorang ibu menurunkan secara penuh DNA *mitokondria* kepada anaknya. Lalu bagaimana dengan ayah? Seorang ayah akan mewariskan kromosom Y pada anak laki-lakinya (karena kromosom Y hanya dimiliki laki-laki yang



kromosom seksnya XY). Sedangkan anak perempuan tidak memiliki kromosom Y (kromosom seks perempuan XX)<sup>21</sup>.

Untuk membuktikan hubungan seseorang dengan keluarga pihak ayah bisa dilakukan dengan membandingkan kromosom Y seorang anak dengan ayah kandungnya atau dengan saudara kandung dari pihak ayah. Karena pemeriksaan kromosom Y hanya untuk anak laki-laki, maka untuk melakukan tes DNA pada seorang anak perempuan tes DNA dilakukan dengan cara mengambil DNA dari kromosom somatik. Ikatan DNA pada bagian somatik hampir sama pada setiap orang karena berfungsi membentuk fungsi dan organ tubuh. Kesalahan urutan dapat menyebabkan gangguan pada manusia yang bersangkutan, tetapi pada inti sel ini pula terdapat area yang dikenal sebagai area STR (*Short Tandem Repeats*). Area ini tidak memberikan kode untuk melakukan sesuatu. STR inilah yang bersifat unik karena berbeda pada setiap orang. Perbedaannya terletak pada urutan pasang basa yang dihasilkan dan urutan pengulangan STR. Urutan AGACC akan berbeda dengan seseorang yang memiliki untaian AGACT. Begitu juga dengan urutan pengulangan yang bersifat unik. Pola STR ini diwariskan dari orang tua<sup>22</sup>.

Tes DNA dilakukan dengan mengambil sedikit bagian dari tubuh Anda untuk dibandingkan dengan orang lain. Bagian yang dapat diambil untuk dicek adalah rambut, air liur, urine, cairan vagina, sperma, darah,

---

<sup>21</sup> [http://www.medicalera.com/qna\\_answer.php?thread=2169/](http://www.medicalera.com/qna_answer.php?thread=2169/). Diakses pada tanggal 4 Februari 2016, pukul 08.00 WITA.

<sup>22</sup> *Ibid.*

dan jaringan tubuh lainnya. Sampel ini tidak akan berubah sepanjang hidup seseorang. Penggunaan alkohol, rokok atau obat-obatan tidak akan mengubah susunan DNA. Hasil tes DNA akan dijalankan dari pasien baru dapat dilihat 2-4 minggu. Biaya yang dibutuhkan untuk tes DNA saat ini sekitar 7 hingga 8 juta Rupiah<sup>23</sup>.

Di dalam dunia *forensik*, pengambilan sel DNA dapat memberikan keterangan genetik pada tubuh manusia yang telah meninggal. Ini penting untuk mengungkap identitas seseorang yang telah meninggal, seperti misalnya pada korban pembunuhan atau kecelakaan. Jika seseorang telah meninggal sehingga dagingnya membusuk atau komponen jaringannya rusak, salah satu cara yang umum dilakukan oleh dokter *forensik* untuk mengambil contoh sel DNA adalah dengan mendapatkannya dari tulang dan gigi mayat tersebut. Karena tulang dan gigi adalah jaringan yang sulit hancur dan kuat bertahan bahkan hingga ratusan tahun<sup>24</sup>.

Tes DNA umumnya digunakan untuk 2 tujuan, yaitu (1) tujuan pribadi seperti; penentuan perwalian anak, tunjangan anak, adopsi, imigrasi, warisan atau penentuan orang tua dari anak dan (2) tujuan hukum, yang meliputi masalah *forensik* seperti identifikasi korban yang telah hancur, sehingga untuk mengenali identitasnya diperlukan pencocokan antara DNA korban dengan terduga keluarga korban ataupun

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> <http://health.detik.com/read/2014/12/31/140220/2791071/763/bagian-tubuh-yang-sering-dijadikan-sumber-dna-darah-hingga-sperma/>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2016, pukul 07.14 WITA.

untuk pembuktian kejahatan semisal dalam kasus pemerkosaan atau pembunuhan<sup>25</sup>.

Dari uraian di atas, maka putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi jembatan antara hukum yang ada dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, sehingga terbuka ruang bagi anak-anak yang lahir diluar perkawinan untuk mendapatkan haknya hanya dari ayah biologisnya.

### **3. Putusan Mahkamah Konstitusi Berlaku Bagi Semua Anak Luar Kawin**

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Majelis Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang mengatur “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus **dibaca**, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”<sup>26</sup>.

Oleh karena itu, tidak ada satupun kalimat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan atau setidaknya dapat ditafsirkan hanya berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri,

---

<sup>25</sup> <http://www.medicinesia.com/kedokteran-dasar/sel-dan-biomolekuler/penyiapan-sampel-guna-tes-dna-2/>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2016, pukul 07.14 WITA.

<sup>26</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

maka kaidah hukum yang menyangkut tentang perlindungan anak diluar kawin dalam putusan tersebut juga berlaku bagi semua jenis anak luar kawin. Memang beberapa pendapat bermunculan mengenai ruang lingkup maksud dan tujuan dari makna perlindungan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagian menganggap wajar dan rasional jika Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan siri, karena perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah menurut agama. Namun, jika putusan tersebut diberlakukan bagi anak-anak zina, maka akan timbul persoalan karena Putusan Mahkamah Konstitusi akan dianggap telah melegalkan anak-anak zina yang artinya juga melegalkan perbuatan zina. Namun, perlu sejenak kita renungkan bahwa setiap anak yang lahir dari rahim seorang perempuan tidak pernah tahu dan membayangkan sebelumnya bahwa ia akan terlahir dari hubungan yang tidak sah, sehingga sulit untuk diterima secara logika jika sesungguhnya kelahiran itu bukan kehendak dari si anak, tetapi akibatnya harus ditanggung oleh si anak.

Penulis menganggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi cukup *progresif* dan *revolusioner* karena terlepas dari hukum agama yang tidak pernah mungkin bisa berubah menyangkut kedudukan anak luar kawin (anak zina) yang hanya bisa *dinasabkan* kepada ibunya, tetapi bukan berarti bahwa si ayah biologis sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada si anak. Sedangkan dalam Pasal 867 ayat (2) KUH Perdata saja mengatur tentang pemberian hak nafkah

bagi anak yang lahir dari perzinaan dan penodaan darah (*sumbang*) walaupun secara hukum anak tersebut sampai kapanpun tidak mungkin akan memiliki ayah maupun ibu secara yuridis karena orang tua mereka dilarang oleh undang-undang untuk melakukan pengakuan terhadapnya.

Setiap anak akan membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya, di saat fase primer pertumbuhannya, seorang anak membutuhkan nafkah *hadhanah* yang layak sehingga ia dapat bertahan hidup, persoalan waris dan pewarisan sebenarnya bukanlah kebutuhan yang mendesak bagi si anak pascakelahiran sampai dengan menjelang dewasa, sehingga terjalannya hubungan keperdataan bagi si anak terhadap ayah biologisnya bukanlah semata-mata untuk kepentingan waris dan mewaris, tetapi yang lebih penting dan primer adalah untuk memberikan kepastian terjaminnya kebutuhan si anak di masa-masa awal pertumbuhannya.

## **E. Catatan Sipil**

### **1. Pengertian Catatan Sipil**

Di Indonesia dikenal adanya suatu Lembaga Catatan Sipil yang diusahakan oleh pemerintah Lembaga Catatan Sipil sebenarnya merupakan kelanjutan dari Lembaga Catatan Sipil pada zaman Belanda yang dikenal dengan nama "*Burgelijke stand*" atau yang dikenal dengan singkatan B.S. yang berarti suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status

atau peristiwa-peristiwa penting bagi negara seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Mengenai peristilahan dari Catatan Sipil, bukanlah dimaksud sebagai suatu catatan dari orang-orang sipil atau golongan sipil sebagai lawan dari kata golongan militer, akan tetapi Catatan Sipil itu merupakan suatu catatan menyangkut kedudukan hukum seseorang. Oleh karena Negara Indonesia adalah suatu negara hukum maka kedudukan hukum dari suatu peristiwa pada setiap warga negaranya harus jelas dan pasti. Manusia dalam menjalankan hidupnya mengalami peristiwa-peristiwa penting, antara lain: peristiwa perkawinan, peristiwa kelahiran, peristiwa pengakuan atau pengesahan anak, peristiwa perceraian, dan peristiwa kematian.

Semua daftar dari peristiwa tersebut dibukukan adalah terbuka untuk umum, sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan dapat mengetahui dan memperoleh bukti serta kepastian tentang perkawinan, kelahiran pengakuan/ pengesahan anak, perceraian, dan kematian seorang. Dalam rangka untuk keperluan itulah pemerintah mengadakan Lembaga Catatan Sipil.

## **2. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan salah satu urusan wajib Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Daerah. Pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil

merupakan sub-bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah Kabupaten/Kota adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting<sup>27</sup>.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi<sup>28</sup>:

- a) Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

---

<sup>27</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- b) Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c) Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d) Mendokumentasikan hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e) Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f) Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi<sup>29</sup>:

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.



- a) Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh Penduduk;
- b) Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c) Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- d) Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

Adapun tujuan dari Lembaga Catatan Sipil adalah untuk mencatat selengkapnya dan sejelas-jelasnya sehingga memberikan kepastian yang sebenar-benarnya mengenai semua kejadian, yaitu<sup>30</sup>:

- a) Kelahiran;
- b) Pengakuan (terhadap kelahiran);
- c) Perkawinan dan perceraian;
- d) Kematian;
- e) Izin kawin.

Menurut Pasal 4 *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bagi Golongan Eropa berlaku beberapa pencatatan, yaitu:

---

<sup>30</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm 5-6.

- a) Kelahiran;
- b) Pemberitahuan kawin;
- c) Izin kawin;
- d) Perkawinan dan perceraian;
- e) Kematian.

Pada perkembangan selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/ Kotamadya, terdapat 5 jenis akta catatan sipil, yaitu<sup>31</sup>:

- a) Akta Kelahiran;
- b) Akta Perkawinan;
- c) Akta Perceraian;
- d) Akta Pengakuan dan Pengesahan anak; dan
- e) Akta Kematian.

## **F. Akta Kelahiran**

### **1. Pengertian Akta Kelahiran dan Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran**

Pengertian akta kelahiran menurut (Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84) adalah<sup>32</sup>:

---

<sup>31</sup> Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 63-64.

<sup>32</sup> Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84.

“Surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta kelahiran itu”.

Sedangkan pengertian akta kelahiran menurut Soebekti adalah “Suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani”.

Adapun prosedur pembuatan akta kelahiran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon berkewajiban<sup>33</sup>:

- a. Mengisi dan menandatangani formulir diketahui Lurah dan Camat dimana orang tua bertempat tinggal;
- b. Pencatatan Kelahiran tidak dikenakan biaya retribusi;
- c. Melampirkan persyaratan;
- d. Pemohon Kelahiran baru/terlambat dan Dispensasi yang dikuasakan mengisi surat kuasa bermaterai cukup;
- e. Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu/ terlambat dilampiri dengan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Walikota, Kepala Dinas bermaterai cukup dan selanjutnya akan diterbitkan keputusan tentang persetujuan pencatatan kelahiran terlambat.

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Selain itu, Dinas berkewajiban:

- a. Menerima permohonan dan meneliti persyaratan;
- b. Setelah persyaratan lengkap dan benar, selanjutnya dicatat dalam registrasi kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran;
- c. Jangka waktu penyelesaian 7 hari.

## **2. Tujuan dan Fungsi Akta Kelahiran**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa manfaat dari akta kelahiran, yaitu<sup>34</sup>:

- a. Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang;
- b. Sebagai dokumen/ bukti sah mengenai identitas seseorang;
- c. Sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah;
- d. Masuk sekolah TK sampai Perguruan Tinggi;
- e. Melamar pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI;
- f. Pembuatan KTP, KK, dan NIK;
- g. Pembuatan SIM;

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- h. Pembuatan Pasport;
- i. Pengurusan tunjangan keluarga;
- j. Pengurusan warisan;
- k. Pengurusan beasiswa;
- l. Pengurusan pensiunan bagi pegawai;
- m. Melaksanakan ibadah haji;
- n. Pengurusan kematian;
- o. Pengurusan perceraian;
- p. Pengakuan anak; dan
- q. Pengurusan pengangkatan anak.

Adapun fungsi utama dari akta kelahiran<sup>35</sup>:

- a) Menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum. Di dalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak;
- b) Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki sang anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 20.

## **G. Akta Kelahiran Anak Luar Kawin**

### **1. Prosedur Untuk Memeroleh Akta Kelahiran Anak Diluar Kawin**

#### **Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengabulkan permohonan uji materiil atas pasal anak diluar kawin, yaitu Pasal 43 ayat (1) yang sebelumnya mengatur anak diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja kemudian setelah putusan MK tersebut anak diluar kawin juga dapat memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti menurut hukum sangat diapresiasi oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI mengungkapkan hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak sah atau tercatat atau kawin siri angka ini hampir separuh dari total jumlah anak dibawah 5 tahun yang ada di Indonesia<sup>36</sup>.

Sistematika akta kelahiran bagi anak luar kawin adalah sebagai berikut<sup>37</sup>:

#### **1) Data lahir**

- a. Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA),

---

<sup>36</sup> <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentangstatus-anak-luarkawin/>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2016, pukul 21.48 WITA.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.34.

- b. Tempat Kelahiran,
- c. Hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran,
- d. Nama lengkap anak,
- e. Jenis Kelamin,
- f. Nama Ibu.

2) Tanggal, bulan, dan tahun terbit akta

3) Tanda tangan pejabat yang berwenang

Adapun persyaratan yang harus dilampirkan dalam pengurusan akta anak luar kawin adalah sebagai berikut<sup>38</sup>:

- 1) Surat kelahiran dari penolong kelahiran (Rumah Sakit/Dokter/ Bidan/ dan lain-lain);
- 2) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga orang tua/yang bersangkutan;
- 3) Akta kelahiran ibu;
- 4) Menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan melampirkan fotokopi KTP-nya;
- 5) Tata cara memperoleh (kutipan) akta kelahiran untuk anak luar kawin adalah sama saja dengan memperoleh akta kelahiran pada umumnya. Di dalam akta kelahiran akan tercantum nama ibu saja, tidak tercantum nama ayah dari anak luar kawin tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka apabila ada permohonan mengenai akta kelahiran anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>38</sup> Amrie Hakim, "Akta Kelahiran Untuk Anak Luar Kawin" [http:// www.hukumonline.com/klinik/cl6500/akta-kelahiran-untuk-anak-luar-kawin](http://www.hukumonline.com/klinik/cl6500/akta-kelahiran-untuk-anak-luar-kawin). Diakses pada tanggal 17 Februari 2016, pukul 21.47 WITA.

Nomor 46/PUUVIII/2010 terkait dengan ayah biologisnya haruslah dapat dimungkinkan untuk melakukan beberapa prosedur yang harus dijalani, diantaranya adalah:

- 1) Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Putusan atau Penetapan Pengadilan Negeri terkait bapak biologis anak diluar kawin melalui gugatan atau permohonan dari Pengadilan Negeri setempat;
- 2) Pemohon datang dengan membawa persyaratan terlampir ke loket Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diantaranya:
  - a. Surat keterangan dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. Fotokopi KTP orang tua dan fotokopi KK orang tua;
  - c. Akta kelahiran orang tua;
  - d. Putusan atau Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat terkait ayah biologis anak luar kawin.
- 3) Pendaftar mendatangi buku register akta kelahiran beserta 2 orang saksi.

Namun bila ditinjau lagi dari pembahasan di atas, anak diluar kawin yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 harus jelas. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi stigma yang negatif di dalam masyarakat, karena untuk melindungi kepentingan



seorang anak tidak hanya ditinjau dari sisi hukum saja namun harus ditinjau dari segala aspek yaitu agama, adat istiadat, sosial dan budaya<sup>39</sup>.

## **2. Penetapan Pengadilan Terkait Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin**

Pengadilan yang berwenang mengeluarkan penetapan soal pengesahan anak luar kawin, bagi yang beragama Islam, permohonan penetapan pengadilan diajukan ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Adapun yang termasuk perkara di bidang perkawinan salah satunya adalah penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam (lihat penjelasan Pasal angka 20<sup>40</sup>).

Sedangkan bagi yang beragama non Islam, permohonan penetapan pengadilan soal pengesahan anak luar kawin diajukan ke Pengadilan Negeri<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> I Made Surya Dana, *Tinjauan Yuridis Tentang Akta Kelahiran Anak Diluar Kawin dan Pengaruhnya Terhadap Ayah Biologisnya Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2014, hlm 7.

<sup>40</sup> Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>41</sup> Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **H. Kompetensi Pengadilan dalam Memeriksa Perkara**

### **1. Kompetensi Absolut (Kewenangan Mutlak)**

Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain. Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak ini memberi jawaban atas pertanyaan: apakah peradilan tertentu itu pada umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan kepadanya dan bukan wewenang pengadilan yang lain. Kompetensi absolut /wewenang mutlak disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman<sup>42</sup>.

### **2. Kompetensi Relatif (Kewenangan Nisbi)**

Kepada Pengadilan Negeri dimanakah gugatan atau tuntutan hak harus diajukan? Pertanyaan ini menyangkut pembagian kekuasaan kehakiman (distribusi kekuasaan kehakiman) atau apa yang dinamakan wewenang nisbi dari pada hakim (kompetensi relatif). Jelasnya, kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Cet.IV, Liberty, Yogyakarta, hal.52.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.54.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini penelitian hukum normatif<sup>44</sup>, yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum, bahan-bahan hukum, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan pembuatan akta kelahiran anak luar kawin.

Penelitian skripsi ini digunakan pendekatan kualitatif, yaitu melalui penelitian terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL) dengan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan itu.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan 2 (dua) jenis data, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini Hakim

---

<sup>44</sup> Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 14.

Pengadilan Negeri Polewali yang menangani kasus perdata, Kepala Seksi Bagian Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Kepala Seksi Bagian Penyelenggara Haji dan Umroh di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, dan pemohon (Sunubiah) Penetapan Akta Kelahiran.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan<sup>45</sup>..

### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 33-37.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagai tindak lanjut dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

### **1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)**

Dalam penelitian ini, peneliti membaca, menelaah buku-buku, karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini untuk memperoleh data sekunder.

### **2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian ini dilakukan langsung di Pengadilan Negeri Polewali, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan pihak pemohon (Sunubiah) dalam perkara ini.

#### **D. Analisis Data**

Data dari data primer maupun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini, digunakan metode analisis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul, disistematikan maka data tersebut dianalisa atas dasar-dasar ilmu hukum dan ilmu-ilmu lainnya. Kemudian analisa tersebut ditulis dalam bentuk skripsi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Keabsahan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Tanpa Mencantumkan Nama Ayahnya**

Akta kelahiran merupakan salah satu bukti otentik yang menunjukkan kedudukan hukum dan peristiwa kelahiran seseorang. Akta kelahiran dapat digunakan dalam berbagai keperluan yang berhubungan dengan peristiwa hukum. Akta tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Akta kelahiran diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Di dalam undang-undang tersebut pada Pasal 27 diatur bahwa:

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Jika terjadi keterlambatan dalam mengurus akta kelahiran, maka mengacu pada Pasal 32 ayat (2) UU Adminduk Tahun 2006 yang mengatur bahwa “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”, maka pencatatannya didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri.

Dalam kasus tersebut ibu Sunubiah selaku pemohon sejak lahir tidak/ belum memiliki akta kelahiran. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU Adminduk Tahun 2006 ibu Sunubiah harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan untuk dapat mengurus akta kelahirannya.

Berdasarkan Penetapan Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL disebutkan bahwa:

“Pada tanggal 4 Januari 2013 Sunubiah bermohon kepada Pengadilan Negeri Polewali untuk menerbitkan akta kelahiran. Oleh karena keterlambatan, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang. Penetapan akta kelahiran ini digunakan sebagai persyaratan penerbitan akta kelahiran karena akan digunakan untuk keperluan umroh”.

Menurut penulis, kasus tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keperluan umroh pemohon yang memerlukan akta kelahiran sebagai persyaratan umrohnya. Pemohon sejak lahir tidak memiliki akta kelahiran. Hal ini berarti terjadi keterlambatan dalam mengurus akta kelahiran. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu penetapan pengadilan. Pemohon, dalam hal ini ibu Sunubiah telah mengajukan permohonan terkait penerbitan akta kelahirannya di Pengadilan Negeri Polewali.



Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar terkait dengan pelaksanaan umroh. Dalam wawancara tersebut, bapak H.Muhammad Mimsyad Rusli selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar mengatakan bahwa<sup>46</sup>:

“Haji dan umroh itu dibedakan. Jika haji yang di dalamnya terdapat pelaksanaan umroh, maka pelaksanaannya dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten. Sedangkan, pelaksanaan umroh di luar dari musim haji dikelola oleh penyelenggara-penyelenggara atau travel-travel yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama Pusat di Jakarta. Tidak ada pendaftaran umroh disini, tetapi hanya ada pendaftaran haji. Mengenai akta kelahiran itu berhubungan dengan persyaratan pembuatan paspor untuk keperluan umroh”.

Dengan demikian, salah satu manfaat dari akta kelahiran adalah dapat digunakan untuk keperluan haji/umroh. Akta kelahiran erat hubungannya dengan persyaratan pembuatan paspor untuk keperluan umroh.

Mengenai pengadilan yang berwenang dalam mengeluarkan penetapan anak luar kawin diatur dalam dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 22 April 2016, pukul 10.05 WITA.

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infaq, wakaf dan sadaqah serta ekonomi syari'ah. Dari beberapa tugas dan wewenang Pengadilan Agama tersebut, yang menjadi objek kajian adalah di bidang perkawinan, khususnya perkara mengenai penetapan asal usul anak. Sedangkan bagi yang beragama non Islam, permohonan penetapan soal pengesahan anak luar kawin diajukan ke Pengadilan Negeri<sup>47</sup>.

Menurut penulis, permohonan pemohon untuk penerbitan akta kelahiran kepada Pengadilan Negeri adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pemohon beragama Islam seharusnya mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran anak luar kawinnya kepada Pengadilan Agama.

---

<sup>47</sup> Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berikut merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan penerbitan akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yaitu<sup>48</sup>:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
2. Surat pengantar dari desa;
3. Surat nikah/ keterangan suami isteri di bawah tahun 2007;
4. Surat keterangan lahir dari dokter/ bidan untuk usia 0-60 hari;
5. Fotokopi ijazah SD,SLTP, SMU bagi yang memiliki ijazah;
6. Penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis).

#### Ketentuan Persyaratan Melampirkan Akta Perkawinan

1. Akta perkawinan orang tua merupakan persyaratan dalam pencatatan kelahiran.

(Pasal 5 ayat (2) Perpres No.25 Tahun 2008)

2. Akta perkawinan orang tua tidak dapat diganti oleh surat pernyataan kepala desa/ lurah ataupun pemohon.

(Pasal 35 UU No.23 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) dan (2) KHI dan Surat Mendagri Tanggal 11 Juni 2013 No.472/5120/DUKCAPIL).

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bagian Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 25 April 2016, pukul 11.07 WITA.

3. Pelaporan kelahiran tidak disertai Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua (Surat Nikah), pencatatannya dilaksanakan dengan penulisan status anak seorang ibu.

(Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Mendagri Tanggal 11 Juni 2013 Nomor 472/5120/DUKCAPIL).

Adapun SOP pelayanan penerbitan akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yaitu<sup>49</sup>:

1. Penduduk membawa berkas Kartu Keluarga (KK), surat pengantar dari desa/ kelurahan, surat nikah, surat keterangan lahir dari rumah sakit;
2. Penduduk menyerahkan dokumen kepada petugas loket/ Pelayanan;
3. Petugas Pelayanan menerima berkas, memverifikasi dan memvalidasi, mencatat dalam buku harian, dan menyerahkan berkas ke operator;
4. Operator menerima berkas dari petugas pelayanan, melakukan proses penerbitan NIK, dan mencetak KK dan akta kelahiran;
5. Kas/ bidang meneliti dan mencocokkan hasil cetakan dengan berkas, memparaf dokumen, dan menyerahkan dokumen berkas kepada petugas pelayanan;

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bagian Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 25 April 2016, pukul 11.07 WITA.

6. Petugas pelayanan memproses penandatanganan dan stempel dokumen, menyerahkan dokumen ke petugas pendistribusian, dan melakukan pengarsipan;
7. Petugas pelayanan menyerahkan dokumen KK dan akta kelahiran kepada penduduk dengan tanda terima.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil persyaratan untuk membuat akta kelahiran untuk anak luar kawin adalah sebagai berikut<sup>50</sup>:

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
- c. Kartu Tanda Penduduk orang tua;
- d. Kartu Keluarga orang tua; dan
- e. Kutipan akta perkawinan orang tua.

Tata cara memperoleh (kutipan) akta kelahiran anak luar kawin adalah sama saja dengan memperoleh akta kelahiran pada umumnya. Di dalam akta kelahiran akan tercantum nama ibu saja, tidak tercantum nama ayah dari anak luar kawin tersebut.

Proses pembuatan dan penerbitan akta kelahiran bagi anak luar kawin pada prinsipnya memiliki prosedur yang sama dengan penerbitan

---

<sup>50</sup> Lihat Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

akta kelahiran bagi anak-anak yang sah lainnya, yang membedakan adalah pada pencantuman nama orang tua si anak dan kewajiban si ibu yang membuat akta kelahiran bagi si anak tersebut harus datang secara langsung ke hadapan pegawai Kantor Catatan Sipil, karena si ibu harus menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak akan menuntut kalau isi akta anak tersebut tidak menyebutkan nama dari bapaknya karena si ibu tidak memiliki akta perkawinan atau surat nikah terhadap pencatatan kelahiran si anak<sup>51</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, maka apabila ada permohonan mengenai akta kelahiran anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait ayah biologisnya prosedur yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Putusan atau Penetapan Pengadilan Negeri terkait bapak biologis anak diluar kawin melalui gugatan atau permohonan dari Pengadilan Negeri setempat;
- 2) Pemohon datang dengan membawa persyaratan terlampir ke loket Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diantaranya:
  - a. Surat keterangan dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. Fotokopi KTP orang tua dan fotokopi KK orang tua;
  - c. Akta kelahiran orang tua;

---

<sup>51</sup> D.Y. witanto., *Op.Cit.*, hlm.34.

d. Putusan atau Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat terkait ayah biologis anak luar kawin.

3) Pendaftar mendatangi buku register akta kelahiran beserta 2 orang saksi.

Berdasarkan Penetapan No.07/PDT.P.2013/PN.POL pada butir (3),

Hakim Pengadilan Negeri Polewali menetapkan bahwa:

3) Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk mencatat tentang kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan aktanya, setelah penetapan tersebut telah diajukan kepadanya karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penulis telah melakukan wawancara terhadap ibu Sunubiah yang mengatakan bahwa<sup>52</sup>:

“Sebulan sebelum keberangkatan umroh, saya mengurus akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali untuk kelengkapan berkas umroh. Sejak lahir saya tidak mempunyai akta kelahiran. Oleh karena itu, saya harus ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan. Setelah ke Pengadilan Negeri, saya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk mengurus penerbitan akta kelahiran. Saya telah melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL dalam kelengkapan berkas. Setelah mendapat penetapan, akta kelahiran saya terbit. Di dalam Kutipan Akta Kelahiran saya tercantum nama ayah dan ibu saya”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ibu Sunubiah selaku pemohon penerbitan akta kelahiran, akta kelahiran telah terbit. Di dalam kutipan akta lahirannya tercantum nama ayah dan ibunya. Sedangkan dalam Penetapan No.07/PDT.P/2013/PN.POL hakim memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan ibu Sunubiah (Pemohon Akta Kelahiran) pada tanggal 21 April 2016, pukul 12.25 WITA.

Polewali Mandar untuk menerbitkan akta kelahiran Sunubiah dengan hanya mencantumkan nama ibunya (St.Awa) saja. Akta kelahiran Sunubiah memang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tetapi tidak berdasarkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri No.07/PDT.P/2013/PN.POL.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, penulis melakukan wawancara kepada bapak Yultan Polopadang selaku Kepala Seksi Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar yang mengatakan bahwa<sup>53</sup>: “Penerbitan akta kelahiran anak luar kawin dari hasil penetapan pengadilan belum pernah ditangani oleh Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar sampai saat ini.”

Setelah melakukan wawancara terhadap bapak Yultan Polopadang selaku Kepala Seksi Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, ternyata akta kelahiran anak luar kawin dari hasil penetapan pengadilan tidak pernah diterbitkan

Selanjutnya penulis kembali menanyakan mengenai akta kelahiran Sunubiah kepada bapak Yultan Polopadang selaku Kepala Seksi Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar yang mengatakan bahwa<sup>54</sup>:

“Pada tanggal 18 Juni 2013 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar telah mengeluarkan Akta Kelahiran dengan Nomor 7604-LT-18062013-0046 yang mencatat bahwa di Kandemeng pada tanggal 31 Desember 1953 telah lahir SUNUBIAH

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bagian Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 25 April 2016, pukul 11.07 WITA.

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bagian Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 29 April 2016, pukul 09.07 WITA.



YAHYA ADAM anak ke Enam, perempuan dari Ayah H.YAHYA dan Ibu ST.AWA.”

Menurut penulis, pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar menerbitkan akta kelahiran Sunubiah tetapi tidak berdasarkan pada Penetapan Pengadilan No.07/PDT.P/2013/PN.POL yang memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk menerbitkan akta kelahiran dengan mencantumkan nama ibu Sunubiah saja.

Di sisi lain, Pengadilan Negeri Polewali pun tidak berwenang secara absolut untuk memutus perkara Sunubiah yang seharusnya dilimpahkan ke Pengadilan Agama.

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa akta kelahiran tanpa mencantumkan nama ayahnya adalah tidak sah karena akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tidak berdasar pada Penetapan Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL. Selain itu, Pengadilan Negeri Polewali pun tidak berwenang secara absolut untuk memutus perkara Sunubiah yang seharusnya dilimpahkan ke Pengadilan Agama.

**B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Polewali Dalam Penetapan Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL Tentang Permohonan Pembuatan Akta Kelahiran**

**1. Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan putusan/penetapan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu sendiri. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Sedangkan pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu perkara di pengadilan sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya.

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL, Hakim yang memeriksa telah melakukan pertimbangan yang termaktub dalam amar putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan untuk mendapat akta kelahiran dimana sejak lahir pemohon bernama Sunubiah belum mempunyai akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan pemohon, Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 adalah Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan dalam ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat (1) dikatakan bahwa Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat enam puluh hari sejak kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat (2) bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa di persidangan para pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5 apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon yang bernama Sunubiah dilahirkan di Kandemeng, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman tanggal 31 Desember 1953 dari pasangan suami isteri yang bernama Yahya dan St.Awa, sebagaimana yang tercantum dalam bukti Surat tertanda P.2;
- Bahwa kedua orang tua pemohon telah lama meninggal dunia sehingga pemohon tidak dapat menunjukkan akta nikah dari kedua orang tua pemohon, sebagaimana bukti surat tertanda P.5 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemohon tertanggal 04 Januari 2013;
- Bahwa sejak lahir pemohon belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan penerbitan akta kelahiran karena akan digunakan untuk keperluan umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian, serta fakta-fakta hukum tersebut di atas yang diperoleh dari bukti-bukti surat, yaitu P.1 s/d P.5 yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup dan

beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, permohonan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan. Namun, oleh karena di persidangan pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dia lahir dari perkawinan yang sah, sebagaimana menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan pemohon hanya dapat dikabulkan sebagian, yakni mengenai orang tua sah dari pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sebagian, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara.

## **2. Penetapan Hakim**

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim Pengadilan Negeri Polewali menetapkan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan dari pemohon tersebut untuk sebagian;
- 2) Menyatakan secara hukum bahwa di Kandemeng, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman tanggal 31 Desember 1953 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Sunubiah, anak sah dari St.Awa;
- 3) Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk mencatat tentang kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan aktanya, setelah penetapan tersebut telah diajukan kepadanya karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 115.000,-.

### **3. Analisis Penulis**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim dalam pertimbangannya mengemukakan beberapa dalil hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974,
2. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,
3. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974,
4. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan dalil hukum di atas, penulis memaparkan hasil analisis antara lain:

Pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatur bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Suatu perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan perkawinan itu dicatat di Kantor Urusan Agama (agama Islam) atau Kantor Catatan Sipil (agama non-Islam) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 ayat (1): “Perkawinan itu dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

- 2) Pasal 2 ayat (2): “Perkawinan sah menurut Negara apabila telah dicatatkan di pencatatan Negara”.

Mengenai keabsahan perkawinan sebagian pendapat mengatakan bahwa oleh karena keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan diserahkan kepada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai, maka kewajiban pencatatan tersebut tidak mengikat terhadap sah atau tidaknya suatu proses perkawinan. Namun, berdasarkan pendapat lain bahwa oleh karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, maka syarat pencatatan merupakan syarat tambahan yang mengikat terhadap keabsahan suatu perkawinan dimana hukum akan menganggap bahwa perkawinan itu ada jika telah dicatatkan di kantor pencatat perkawinan.

Dalam wawancara penulis dengan Sunubiah dikatakan bahwa “Kedua orang tuaku (H.Yahya dan St.Awa) telah menikah pada Tahun 1940 di Lantora yang dilakukan di hadapan pemuka agama”<sup>55</sup>.

Sebelum adanya UU Perkawinan telah dikenal perkawinan secara agama yang kemudian tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikenal sebagai “nikah siri”. Perkawinan kedua orang tua Sunubiah terjadi sebelum terbitnya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Oleh sebab itu, perkawinan kedua orang tua Sunubiah termasuk nikah siri. Namun, oleh Hakim Pengadilan Negeri

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Sunubiah pada tanggal 21 April 2016, pukul 12.30 WITA.

Polewali mendasarkan perkawinan kedua orang tua Sunubiah pada UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam pengajuan alat bukti, ibu Sunubiah tidak dapat memberikan bukti surat berupa akta perkawinan kedua orang tuanya, tetapi hanya mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Nikah orang tuanya, sebagaimana wawancara penulis dengan ibu Hamisira Halim, S.H.<sup>56</sup>:

“Dalam berita acara persidangan, Sunubiah telah mengajukan bukti surat fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: 009/02/KL yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 4 Januari 2013. Dalam surat tersebut diterangkan bahwa H.YAHYA telah menikah dengan seorang perempuan bernama ST.AWA pada Tahun 1940 di Lantora, dan telah mempunyai anak; Subaedah (Alm), St.Maryam (Alm), St.Asiah, Pd.Umar (Alm), Nurbiah, Sunubiah, Hj.Mulyati”.

Perkawinan bagi golongan pribumi diatur dalam Pasal 76 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mengatur bahwa:

“Perkawinan harus dilangsungkan di muka umum, dalam gedung dimana akta-akta catatan sipil harus dibuat, di hadapan Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak, dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi, baik keluarga maupun bukan keluarga, yang telah mencapai umur dua puluh satu tahun dan berdiam di Indonesia.”

Dalam kasus ini, ibu Sunubiah tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan kedua orang tuanya adalah perkawinan yang sah sebagaimana diatur Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sunubiah mengakui bahwa kedua orang tuanya telah menikah, tetapi hanya dilakukan di depan pemuka agama. Kedua orang tua Sunubiah

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 26 April 2016, pukul 09.30 WITA.

juga telah meninggal dunia<sup>57</sup>. Dalam Surat Keterangan Nikah yang diajukan oleh Sunubiah pun tidak menjelaskan saksi-saksi perkawinan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam Pasal 26 UU Perkawinan diatur bahwa:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Berdasarkan pasal tersebut, perkawinan kedua orang tua Sunubiah meskipun dilakukan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi, perkawinannya sah apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan. Dalam KUHPerdara, pencatatan perkawinan diatur dalam bagian ke tujuh Pasal 100 dan Pasal 101. Dalam Pasal 100 KUHPerdara, bukti adanya perkawinan adalah melalui akta perkawinan yang telah dibukukan dalam catatan sipil. Pengecualian terhadap pasal ini, yaitu

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Pemohon Penerbitan Akta Kelahiran pada tanggal 21 April 2016, pukul 12.30 WITA.



Pasal 101 KUHPdata, apabila tidak terdaftar dalam buku di catatan sipil, atau hilang, maka bukti tentang adanya suatu perkawinan dapat diperoleh dengan meminta kepada pengadilan. Di pengadilan akan diperoleh suatu keterangan apakah ada atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan pertimbangan hakim.

Secara hukum Islam, perkawinan kedua orang tua Sunubiah adalah sah dan secara yuridis juga sah meskipun tidak dicatatkan dalam pencatatan Negara, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan menurut penulis, perkawinan kedua orang tua juga sah karena telah memperlihatkan surat keterangan menikah kedua orang tua Sunubiah, meskipun tidak memiliki akta nikah kedua orang tua Sunubiah. Pencatatan hanya merupakan kewajiban administratif yang tidak berhubungan dengan keabsahan perkawinan.

Perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah diatur di dalam Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya Akta Nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974; dan
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Menurut penulis, karena perkawinan kedua orang tua Sunubiah terjadi sebelum lahirnya UU Perkawinan, maka perlu diajukan permohonan itsbat nikah perkawinan kedua orang tuanya ke Pengadilan Agama.

Selain dalil hukum UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hakim juga berdalil hukum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Hamisira Halim, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Polewali, dalil hukum yang

digunakan adalah mengacu pada UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan karena berhubungan dengan perkawinan sah dan keterlambatan dalam mengurus akta kelahiran<sup>58</sup>.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”. Selanjutnya, dalam Pasal 32 ayat (2) UU Adminduk No. 23 Tahun 2006 ayat (2) mengatur bahwa “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri”.

Mengenai akta kelahiran melalui Penetapan Pengadilan, Mahkamah Konstitusi telah membuat Putusan terbaru yaitu Nomor: 18/PUU-11/2013 terkait mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama, yang menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembuatan akta kelahiran bagi anak yang usianya lebih dari satu tahun tidak perlu lagi ke pengadilan karena Putusan MK.

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 26 April 2016, pukul 09.30 WITA.

Dengan demikian, akta kelahiran pengurusannya akan seperti semula dan warga tak perlu lagi datang mengikuti sidang bagi yang tidak memiliki akta kelahiran dengan umur anak lebih satu tahun. Putusan MK tersebut telah pula ditindak lanjuti oleh Mendagri dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013.

Surat Edaran tersebut, Mendagri menegaskan 3 hal, yaitu:

1. Sejak tanggal 1 Mei 2013, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun pencatatannya tidak lagi memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri, tetapi langsung diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
2. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahirannya dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana dalam hal ini yang dimaksud adalah Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
3. Pencatatan kelahiran tersebut dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> <http://merantiupdates.blogspot.com/2013/05/selatpanjang-sebelumnya-masyarakat.html>, Diakses pada tanggal 30 April 2016, pukul 07.32 WITA.

Akibatnya, pembuatan akta kelahiran bagi anak yang usianya lebih dari satu tahun tidak perlu lagi ke Pengadilan, tetapi langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota.

Surat Edaran Mendagri memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia untuk segera menyesuaikan tata cara dan persyaratan pelayanan pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran.

Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam Penetapan Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL, yaitu pada Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sudah tepat. Hal ini karena penetapan ini dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2013 sedangkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2304/SJ diterbitkan pada tanggal 6 Mei 2013. Pemberlakuan surat edaran ini belum diberlakukan karena penetapan lebih dahulu ditetapkan dibandingkan dengan keluarnya Surat Edaran Mendagri tersebut.

## **Kekurangan dalam Pertimbangan Hukum Hakim**

### **1. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan**

Menurut penulis, hakim tidak memasukkan dan mencantumkan dalil hukum Putusan Mahkamah Kostitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin. Dalam pertimbangannya, hakim hanya mencantumkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Padahal sejak tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan dengan Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang mengatur bahwa:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Rumusan pasal tersebut mengandung makna bahwa hubungan keperdataan antara si anak dengan pihak ibu terjadi secara otomatis (demi hukum), sedangkan hubungan keperdataan dengan pihak ayah tetap tidak terjadi dengan sendirinya, karena pihak-pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini si ibu atau si anak harus membuktikan terlebih dahulu bahwa si laki-laki yang dianggapnya sebagai ayah biologisnya itu benar-benar ayahnya.

Sebenarnya, ada 2 pandangan mengenai makna putusan tersebut, yaitu:

1. Dari sudut pandang laki-laki, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan dapat menekan tingkat persetubuhan di luar nikah, karena setiap laki-laki akan berpikir panjang untuk melakukan persetubuhan di luar nikah. Jika dari perbuatan itu kemudian melahirkan anak, dirinya tidak akan bebas dari pertanggung jawaban secara perdata kepada si anak dan ibunya;
2. Dari sudut pandang perempuan, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bisa menjadi *kontraproduktif* karena seorang perempuan tidak akan merasa khawatir lagi untuk berhubungan seks sebelum nikah, dengan anggapan bahwa suatu saat jika lahir seorang anak tetap ia akan memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang menghamilinya.

Berdasarkan 2 sudut pandang tersebut, sebenarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menempatkan posisi di pihak laki-laki maupun perempuan. Namun, terlebih pada posisi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah untuk bisa mendapatkan kedudukan hukum yang sama seperti kebanyakan anak lainnya. Selain itu, juga akan menimbulkan akibat hukum, terutama dalam hal pewarisan.

Putusan tersebut tidak hanya berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, tetapi juga berlaku bagi semua jenis anak luar kawin<sup>60</sup>.

Putusan MK tersebut memberikan kesempatan kepada anak luar kawin agar dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya ketika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain. Salah satu cara membuktikannya adalah dengan melakukan tes DNA.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Sunubiah (Pemohon) bahwa<sup>61</sup>: “Kedua orang tuaku telah meninggal dunia”.

Menurut penulis, walaupun kedua orang tua dari Sunubiah telah meninggal dunia, hubungan keperdataan dengan ibunya terjadi secara otomatis, tanpa harus membuktikannya terlebih dahulu. Berbeda dengan ayahnya, terlebih dahulu harus dibuktikan dengan tes DNA. Untuk dapat membuktikan hubungan seseorang dengan keluarga pihak ayah bisa dilakukan dengan membandingkan kromosom Y seorang anak dengan ayah kandungnya atau dengan saudara kandung dari pihak ayah. Namun, berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Sunubiah yang mengatakan bahwa<sup>62</sup>: “Saudara kandung bapakku juga telah meninggal dunia”.

---

<sup>60</sup> D.Y.Witanto., *Op.Cit.*, hlm.249-250.

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Pemohon Penerbitan Akta Kelahiran pada tanggal 21 April 2016, pukul 12.30 WITA.

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Pemohon Penerbitan Akta Kelahiran pada tanggal 21 April 2016, pukul 12.30 WITA.



Oleh karena itu, untuk dapat membuktikan bahwa Yahya adalah ayah biologis dari Sunubiah adalah dengan mengambil contoh sel DNA yang didapatkannya dari tulang dan gigi mayat tersebut karena tulang dan gigi adalah jaringan yang kuat dan sulit hancur hingga ratusan tahun.

Namun, dalam bukti-bukti surat yang dilampirkan Pemohon kepada Pengadilan Negeri Polewali tidak ada surat keterangan tes DNA dari dokter.

## **2. Keterangan saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti**

Alat bukti dalam perkara perdata adalah berupa bukti tulisan/ surat, kesaksian, persangkaan (hakim), pengakuan (para pihak), dan sumpah<sup>63</sup>. Dalam kasus tersebut, pemohon mengajukan 2 alat bukti, yaitu surat dan keterangan saksi. Syarat materiil saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata, keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya:

---

<sup>63</sup> Pasal 164 HIR, 284 RBG.

- a. Berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUHPerdara;
- b. Keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain;
- c. Disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan<sup>64</sup>.

Saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, tidak diterima (*inadmissable*) sebagai alat bukti<sup>65</sup>.

Pada umumnya, sikap para praktisi hukum yang secara otomatis menolak *testimonium de auditu* sebagai alat bukti tanpa adanya analisis dan pertimbangan yang argumentatif, dengan mengambil contoh Putusan Mahkamah Agung No. 881 K/Pdt/1983 tanggal 18 Agustus 1984 yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari *de auditu* sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti, Putusan Mahkamah Agung No. 4057 K/Pdt/1986 tanggal 30 April 1988 pada putusan inipun langsung ditolak dengan alasan para saksi terdiri dari saksi *de auditu*.

---

<sup>64</sup> M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.661.

<sup>65</sup> Teguh Samudera, 1992, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hlm.63.

Oleh karena itu, tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sebagai alat bukti, dan Putusan Mahkamah Agung No.1842 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 karena ketiga orang saksi yang diajukan penggugat adalah saksi *de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian<sup>66</sup>.

Dalam kasus tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu Munandar Triwibowo dan Firman. Munandar Triwibowo merupakan menantu dari Sunubiah, sedangkan Firman adalah kamanakan dari Sunubiah<sup>67</sup>. Kedua saksi telah memberikan keterangannya di persidangan. Namun, kedua saksi tersebut tidak mengetahui pokok perkara, yaitu terkait keterlambatan dalam mengurus akta kelahiran dan terjadinya perkawinan kedua orang tua Sunubiah. Dalam artian, peristiwa pokok kasus tersebut tidak disaksikan langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar peristiwa pokok kasus tersebut (saksi *de auditu*). Kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang diatur dalam Pasal 1907 KUHPerdara, Pasal 171 ayat (1) HIR. Oleh karena itu, keterangan saksi itu tidak sah sebagai alat bukti.

---

<sup>66</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 664.

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Pemohon Penerbitan Akta Kelahiran pada tanggal 21 April 2016, pukul 12.30 WITA.

### **3. Keabsahan Seorang Anak Berdasarkan KUHPerdata**

Keabsahan seorang anak tidak diatur di dalam peraturan prundang-undangan lain. Oleh sebab itu, hakim dalam menggali hukum dapat menjadikan aturan dalam KUHPerdata untuk dijadikan sebagai patokan. Namun Penetapan No. 07/PDT.P/2013/PN.POL, Hakim tidak memasukkan landasan yuridis KUHPerdata di dalam pertimbangannya. Seharusnya hakim juga berdasar pada KUHPerdata sebab ibu Sunubiah (Pemohon) lahir pada tahun 1953, sementara Undang-Undang Administrasi Kependudukan lahir pada tahun 2006 jo.tahun 2013 sehingga permohonan penetapan akta kelahiran didasarkan pada undang-undang tersebut.

Dalam kasus tersebut hakim menentukan keabsahan anak hanya mendasarkan pada ada tidaknya akta perkawinan kedua orang tua pemohon. Sunubiah tidak dapat memberikan bukti surat berupa akta perkawinan kedua orang tuanya, tetapi hanya mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Nikah orang tuanya, sebagaimana wawancara penulis dengan ibu Hamisira Halim,S.H<sup>68</sup>: “Dalam berita acara persidangan, Sunubiah telah mengajukan bukti surat fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: 009/02/KL tertanggal 4 Januari 2013.”

Menurut penulis, seharusnya hakim juga menjadikan dasar hukum KUHPerdata di dalam pertimbangannya karena baik Undang-Undang

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 26 April 2016, pukul 09.30 WITA.

Administrasi tahun 2006 jo.tahun 2013 maupun Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 belum lahir sebab Sunubiah lahir pada tahun 1953. Sebelum undang-undang tersebut berlaku, maka keberlakuan KUHPperdata inilah yang berlaku bagi warga Negara Indonesia.

Berdasarkan KUHPperdata keabsahan seorang anak dibuktikan dengan akta perkawinan kedua orang tua, akta kelahiran, keadaan nyata, dan saksi-saksi. Syarat inilah yang harus menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat penetapan permohonan. Keabsahan anak tersebut diatur dalam Pasal 102, 261, 262, dan 263 KUHPperdata.

#### **Pasal 102 KUHPperdata**

Keabsahan seorang anak tak dapat disangkal karena tak dapat diperlihatkannya akta perkawinan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, apabila anak itu telah memperlihatkan kedudukannya sebagai anak sesuai dengan akta kelahirannya dan kedua orang tuanyapun secara terang-terangan telah hidup bersama selaku suami isteri.

#### **Pasal 261 KUHPperdata**

Asal keturunan anak-anak sah dibuktikan dengan akta-akta kelahiran yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil. Bila tidak ada akta demikian, cukuplah bila seorang anak telah mempunyai kedudukan tak terganggu sebagai anak sah.

#### **Pasal 262 KUHPperdata**

Pemilikan kedudukan demikian dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa yang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menunjukkan hubungan karena kelahiran dan karena perkawinan antara orang tertentu dan keluarga yang diakui olehnya, bahwa dia termasuk di dalamnya. Yang terpenting dari peristiwa-peristiwa ini antara lain adalah: bahwa orang itu selalu memakai nama bapak yang

dikatakannya telah menurunkannya; bahwa bapak itu telah memperlakukan dia sebagai anaknya, dan dia sebagai anak telah diurus dalam hal pendidikan, pemeliharaan dan penghidupannya; bahwa masyarakat senantiasa mengakui dia selaku anak bapaknya; bahwa sanak saudaranya mengakui dia sebagai anak bapaknya.

### **Pasal 263 KUHPerdara**

Tiada seorang pun dapat menyandarkan diri pada kedudukan yang bertentangan dengan kedudukan yang nyata dinikmatinya dan sesuai dengan akta kelahirannya, dan sebaliknya tiada seorang pun dapat menyanggah kedudukan yang dimiliki seorang anak sesuai dengan akta kelahirannya.

### **Pasal 264 KUHPerdara**

Bila tidak ada akta kelahiran dan tidak nyata pemilikan kedudukan yang tak terputus-putus, dan bila anak itu didaftarkan dengan nama-nama palsu dalam daftar-daftar Catatan Sipil atau seakan-akan dilahirkan dari bapak ibu yang tidak dikenal, maka asal keturunannya dapat dibuktikan dengan saksi-saksi. Namun pembuktian dengan cara demikian tidak boleh diperkenankan, kecuali bila ada bukti permulaan tertulis, atau bila dugaan-dugaan atau petunjuk-petunjuk dari peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, dapat dianggap cukup berbobot untuk memperkenankan pembuktian demikian.

Berdasarkan uraian di atas maka keabsahan seorang anak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan kedua orang tua, akta kelahiran, keadaan nyata, dan saksi-saksi. Dalam pertimbangan hakim, pemohon tidak dapat memperlihatkan akta perkawinan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia sehingga keabsahan anak tersebut disangkal. Padahal dalam Pasal 102 KUHPerdara sudah jelas diatur bahwa: “Keabsahan seorang anak tak dapat disangkal karena tak dapat diperlihatkannya akta perkawinan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, apabila anak itu telah memperlihatkan kedudukannya sebagai anak sesuai dengan akta kelahirannya dan kedua orang

tuanyapun secara terang-terangan telah hidup bersama selaku suami isteri”.

Menurut penulis, Hakim keliru dalam menetapkan penetapan tersebut. Dalam Pasal 261 dan 262 KUHPdata, pemilikan kedudukan sebagai anak sah dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa yang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menunjukkan hubungan karena kelahiran dan karena perkawinan antara orang tertentu dan keluarga yang diakui olehnya, bahwa dia termasuk di dalamnya. Kedudukan Sunubiah sebagai anak sah telah nyata karena menurut keterangan saksi, Munandar Triwibowo dan Firman bahwa Sunubiah dilahirkan pasangan suami isteri yang bernama Yahya dan St.Awa. Selain itu, di dalam Surat Keterangan Menikah diterangkan bahwa kedua orang tua Sunubiah telah menikah pada Tahun 1940. Ini berarti Sunubiah adalah anak sah dari kedua orang tuanya.

Hakim Pengadilan Negeri Polewali tidak menjadikan syarat-syarat tersebut di atas sebagai dasar pertimbangan hakim dalam membuat Penetapan Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL. Hakim tidak menanyakan kepada saksi-saksi tersebut apakah saksi mengenal orang tua Sunubiah atau tidak dan tanda-tanda jika benar Sunubiah adalah anak sah dari kedua orang tuanya.

### **Kelemahan Penetapan**

Berdasarkan beberapa kekeliruan dalam memberikan dalil hukum pada pertimbangan hukum, maka hasil penetapan hakim pun otomatis

menjadi keliru. Beberapa kekeliruan yang penulis dapatkan dalam Penetapan Nomor 07.PDT.P/2013/PN.POL antara lain:

**1. Mengabulkan permohonan dari pemohon tersebut untuk sebagian**

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan, serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka status hukum perkawinan tidak dapat diakui oleh Negara, sekalipun sah menurut hukum agama masing-masing karena pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk pembuktian status anak yang akan lahir.

Dalam kasus tersebut, pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali untuk mengabulkan permohonan pemohon, yaitu Sunubiah merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Yahya dan St.Awa. Pemohon telah mengajukan 2 alat bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi. Bukti surat yang diajukan pemohon hanya Surat Keterangan Menikah Nomor:009/02/KL dan 2 orang saksi (Munandar Triwibowo dan Firman) yang keduanya tidak mengetahui perkawinan kedua orang tua pemohon.

Akibat tidak memiliki akta nikah kedua orang tua Pemohon, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, perkawinan kedua orang tuanya tidak sah karena tidak dicatat di catatan sipil. Oleh karena



perkawinan kedua orang tuanya tidak sah, maka permohonan pemohon hanya dapat dikabulkan untuk sebagian.

Menurut penulis, penetapan tersebut kurang tepat karena hakim tidak memasukkan dalil hukum KUHPerdara terkait keabsahan anak. Berdasarkan KUHPerdara, keabsahan seorang anak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan kedua orang tua, tetapi dapat pula dibuktikan dengan akta kelahiran, keadaan nyata, saksi-saksi. Syarat inilah yang harus menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat penetapan permohonan.

**2. Menyatakan Secara Hukum Bahwa di Kandemeng, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman Tanggal 31 Desember 1953 Telah Dilahirkan Seorang Anak Perempuan Bernama SUNUBIAH Anak Sah dari ST.AWA**

Dalam pertimbangannya, hakim berdasar pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa: “kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Akibatnya status hukum Sunubiah hanya diakui sebagai anak dari ibunya saja. Padahal sejak tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah direvisi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus **dibaca** “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Menurut penulis, hakim dalam pertimbangannya tidak memasukkan dalil hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 sehingga permohonan pemohon hanya dapat dikabulkan sebagian, yakni mengenai orang tua sah dari pemohon. Akibatnya, hakim dalam menetapkan perkara hanya menyatakan Sunubiah merupakan anak sah dari ibunya saja. Dengan kata lain, kedudukan Sunubiah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Pertimbangan hukum hakim tersebut jelas keliru karena dalam hal kedudukan anak luar kawin, hakim hanya berdalil pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Padahal oleh Mahkamah Konstitusi pasal tersebut telah diuji materiilnya. Putusan MK menyangkut status anak luar kawin tersebut dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, sedangkan Penetapan Pengadilan Negeri Polewali dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2013. Berdasarkan asas hukum *lex posteriori derogate legi priori* seharusnya, Hakim juga memasukkan Putusan MK tersebut ke dalam dalil pertimbangan hukumnya.

Akibat dari pertimbangan yang kurang tepat, maka dalam penetapannya Hakim hanya mengabulkan permintaan pemohon untuk sebagian, yaitu menyatakan secara hukum bahwa di Kandemeng, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman tanggal 31 Desember 1953 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Sunubiah anak sah dari St. Awa. (ibunya) saja. Hal tersebut jelas merugikan pemohon karena status hukumnya hanya diakui anak dari ibunya saja. Sedangkan hubungan hukum dengan ayahnya tidak diakui. Akibatnya, Sunubiah tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya.

**3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Mencatat tentang Kelahiran Tersebut dalam Register yang Sedang Berjalan dan Menerbitkan Aktanya, Setelah Penetapan Tersebut Telah Diajukan kepadanya Karena telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap**

Berdasarkan Penetapan Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL, pemohon (Sunubiah) beragama Islam. Akibat dari perkawinan kedua orang tua pemohon yang tidak sah, maka status anaknya pun menjadi tidak sah. Anak tidak sah dalam arti sempit disebut pula anak luar kawin (KUHPerdata).

Mengenai pengadilan yang berwenang mengeluarkan penetapan anak luar kawin bagi beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan yang non Islam ke Pengadilan Negeri.

Kasus ini diajukan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri pun mengeluarkan Penetapan tersebut.

Menurut penulis, pengadilan negeri tidak berwenang secara absolut untuk memutus perkara tersebut. Seharusnya hakim melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Agama dan mengeluarkan putusan agar Pengadilan Agama menangani perkara tersebut. Pengadilan Agama yang berhak mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk mencatat tentang kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan aktanya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan uraian serta hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan yang menjadi pembahasan adalah:

1. Keabsahan akta kelahiran anak luar kawin tanpa mencantumkan nama ayahnya adalah tidak sah karena akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tidak berdasar pada Penetapan Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL. Selain itu, Pengadilan Negeri Polewali pun tidak berwenang secara absolut untuk memutus perkara Sunubiah yang seharusnya dilimpahkan ke Pengadilan Agama.
2. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam dalam Penetapan Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL tentang permohonan pembuatan akta kelahiran terdapat beberapa kekurangan, yaitu tidak mencantumkan dalil hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, hakim mendasarkan keabsahan perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan. Padahal keabsahan perkawinan tidak hanya berhubungan dengan pencatatan perkawinan yang

merupakan kewajiban administratif, tetapi dapat dibuktikan dengan keadaan nyata bahwa laki-laki dan perempuan telah hidup bersama sebagai suami isteri. Selain itu, hakim tidak menjadikan *Burgerlijk Wetboek* sebagai patokannya, terutama dalam hal keabsahan seorang anak yang tidak hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan kedua orang tua, tetapi juga berdasarkan pada akta kelahiran, keadaan nyata, dan saksi-saksi. Oleh karena pertimbangan hukumnya yang keliru, maka hasil penetapannya pun tidak tepat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas dan melihat kekurangan yang ada, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seharusnya hakim lebih cermat dalam memeriksa perkara perdata apakah peradilan itu berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan kepadanya atau bukan wewenang pengadilan yang lain.
2. Sebaiknya hakim harus lebih jeli dan teliti dalam menerapkan dalil hukum di pertimbangan hukumnya sehingga hasil penetapannya pun tidak keliru.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Afandi, Ali. 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Cet-IV. Rineka Cipta: Jakarta.
- Djubaidah, Neng. 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1999. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Harahap, M.Yahya.2004.*Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Herni, Srinurbayanti, dkk. 2003. *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, Cet.2. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia: Jakarta.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan. 1991. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*. Airlangga University Press: Surabaya.
- Rahman, Bakri A dan Ahmad Sukardja. 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/ BW*. PT. Hidakarya Agung: Jakarta.
- Samudera, Teguh.1992.*Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni:Bandung.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Alumni: Bandung.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cet. Kedua. Prenoda Media group: Jakarta.
- Sodharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet.ketiga. Sinar Grafika: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1978. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Supramono,Gatot. 1998. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Djambatan: Jakarta.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Prestasi Pustaka: Jakarta.

Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Prestasi Pustaka: Jakarta.

## **B. JURNAL/ MAKALAH**

I Made Surya Dana, *Tinjauan Yuridis tentang Akta Kelahiran Anak Diluar Kawin dan Pengaruhnya Terhadap Ayah Biologisnya Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2014.

H. Herusko. *Anak di Luar Perkawinan*. Makalah pada Seminar Kowani. Jakarta tanggal 14 Mei 1996.

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materi Undang-Undang Perkawinan.

Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Kitab Undang-Undang HukumPerdata (*Burgelijk Wetboek*).



Kompilasi Hukum Islam (KHI).  
*Herzien Inlandsh Reglement* (HIR)  
*Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG)  
Staatslad Tahun 1941 Nomor 84.

#### D. INTERNET

Amrie Hakim, "Akta Kelahiran Untuk Anak Luar Kawin" <http://www.hukumonline.com/klinik/cl6500/akta-kelahiran-untuk-anak-luar-kawin>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2016, pukul 21.47 WITA.

<http://health.detik.com/read/2014/12/31/140220/2791071/763/bagian-tubuh-yang-sering-dijadikan-sumber-dna-darah-hingga-sperma/>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2016, pukul 07.14 WITA.

<https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/06/17/kedudukan-hukum-anak-luar-kawin/>. Diakses pada tanggal 6 April 2016, pukul 20.00 WITA.

<http://konsultasi.wordpress.com/2010/05/20/harta-waris-untuk-anak-tiri-adakah/>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2016, pukul 14.47 WITA.

[http://www.medicalera.com/qna\\_answer.php?thread=2169/](http://www.medicalera.com/qna_answer.php?thread=2169/). Diakses pada tanggal 4 Februari 2016, pukul 08.00 WITA.

<http://www.medicinesia.com/kedokteran-dasar/sel-dan-biomolekuler/penyiapan-sampel-guna-tes-dna-2/>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2016, pukul 07.14 WITA.

<http://merantiupdates.blogspot.com/2013/05/selatpanjang-sebelumnya-masyarakat.html>. Diakses tanggal 30 April 2016, pukul 07.32 WITA.

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2016, pukul 10.42 WITA.

<http://www.negarahukum.com/hukum/perkawinan-siri-dan-anak-luar-kawin.html>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2016, pukul 03.42 WITA.